

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI**

2025

 (0273) 321029

 www.disnakerwonogiri.id

 Jl. Pemuda I No. 5 - 57612 Wonogiri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor 077/000/8.6.3/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor 450 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 serta Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Wonogiri, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI



WIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700904 199803 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, mempunyai visi **“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri**. Untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
- b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.303.127.791,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 6.959.546.951,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp 1.343.580.840,00.

Perubahan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 menetapkan sebanyak 3 (dua) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun terakhir dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 120,38%
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 149,87%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,57%

Dari hasil pengukuran terhadap capaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat digunakan untuk evaluasi bagi perbaikan pengelolaan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam hal kesejahteraan masyarakat, pada umumnya khususnya masalah ketenagakerjaan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Wonogiri yang signifikan.

Wonogiri, 29 Januari 2026

KERALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI,



WIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19700904 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja, serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.....	2
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	7
1.4 Landasan Hukum.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.1.1 Visi.....	18
2.1.2 Misi.....	18
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	18
2.2 Perencanaan Kinerja.....	20
2.2.1 Indikator Kinerja Utama.....	22
2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	30
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	30
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir...	66
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	76
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah.....	79
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	82
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	89
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	94
8. Capaian Output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	99
9. Realisasi Anggaran.....	109

BAB IV	PENUTUP.....	123
	4.1 Kesimpulan.....	123
	4.2 Rekomendasi.....	124
LAMPIRAN.....		127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Lampiran I Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.....	6
Gambar 3.1	Kegiatan Peningkatan IP ASN pada Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan, Eselon/Golongan dan Pendidikan.....	3
Tabel 1.3	Data Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.....	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2021-2026.....	19
Tabel 2.2	Perencanaan Kinerja (Tujuan, Sasaran dan Program) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri (Sesuai Cascading RENSTRA 2021-2026).....	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja (PERUBAHAN 2025) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.....	26
Tabel 2.5	Anggaran pada Perjanjian Kinerja (PERUBAHAN 2025) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.....	27
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2	Klasifikasi Nilai Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonogiri 2025.....	29
Tabel 3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (TUJUAN DAN SASARAN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	31
Tabel 3.4	Nilai Komponen AKIP 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	36
Tabel 3.5	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.....	38
Tabel 3.6	Hasil Rekap Indeks Profesionalitas ASN 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	39
Tabel 3.7	Rencana Tindak Agen Perubahan 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	44
Tabel 3.8	Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.....	47
Tabel 3.9	Tabel Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.....	49
Tabel 3.10	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar menurut Data Triwulanan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	62
Tabel 3.11	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang kompeten dan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar menurut Data Triwulanan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	63
Tabel 3.12	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja dan Jumlah Perusahaan menurut Data Triwulanan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	64

Tabel 3.13	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	67
Tabel 3.14	Jumlah Indikator Tujuan dan Sasaran saat Tahun 2022 s.d 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	69
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	76
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini (2025) dengan Standar DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Tengah.....	79
Tabel 3.17	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	83
Tabel 3.18	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	91
Tabel 3.19	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan di Tahun 2025.....	95
Tabel 3.20	Capaian Output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	100
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	109
Tabel 3.22	Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.....	114
Tabel 3.23	Realisasi dan Persentase Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Per Triwulan Tahun 2025.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja, serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sesuai Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, maka dalam laporan ini dijelaskan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan, dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- e. Bidang Perindustrian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pengelompokan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas Kelompok Unsur Perencanaan;
- b. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Kelompok Unsur Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Kelompok Unsur Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Transmigrasi.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Hubungan Industrial; dan
 2. Kelompok Unsur Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Pengembangan Industri; dan
 2. Kelompok Unsur Informasi Industri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Kepala Dinas dapat menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana yang kompeten untuk membantu dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri terdiri dari 54 orang pegawai dengan perincian 35 orang PNS dan 19 orang PPPK. Data tersebut tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	STATUS			Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	-	-	1	1
3	SMA	-	-	11	11
4	DIPLOMA I (D1)	-	-	-	-
5	DIPLOMA II (D2)	-	-	-	-
6	DIPLOMA III (D3)	5	-	-	5
7	STRATA 1 (S-1)	23	-	7	30
8	STRATA 2 (S-2)	7	-	-	7
	Jumlah	35	-	19	54

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakerin, 2025

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan, Eselon/Golongan dan Pendidikan

No	Nama Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	II	S2	1
2	Sekretaris Dinas	III	S2	1
3	Kepala Bidang	III	S2	2
			S1	1
4	Kasubag	IV	S2	3
			S1	-
			D4	-
5	Kepala UPTD.BLK	IV	S1	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakerin, 2025

Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025

NO	URAIAN SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
	SARANA		
1	Genset	1	Unit
2	Mobil	5	Unit
3	Sepeda Motor	19	Unit
4	Lemari	21	Buah
5	Meja	157	Buah
6	Kursi	295	Buah
7	AC Split	24	Unit
8	Handycam	1	Unit
9	Sound System	2	Unit
10	Kamera	9	Unit
11	Server	-	Unit
12	LCD	6	Unit
13	Komputer	40	Unit
14	Notebook/laptop	26	Unit
15	Printer	24	Unit
16	Scanner	1	Unit
	PRASARANA		
1	Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 1.055	Unit m ²
	UPTD BLK, Ngadirojo	1 33.918	Unit m ²
2	Instalasi Listrik	5	Unit
3	Aset Tetap Lainnya	46 Buku Perpustakaan	Judul

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakerin, 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan fungsi organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja

dan Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Sekretariat

Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan.

3. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Transmigrasi.

4. Bidang Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

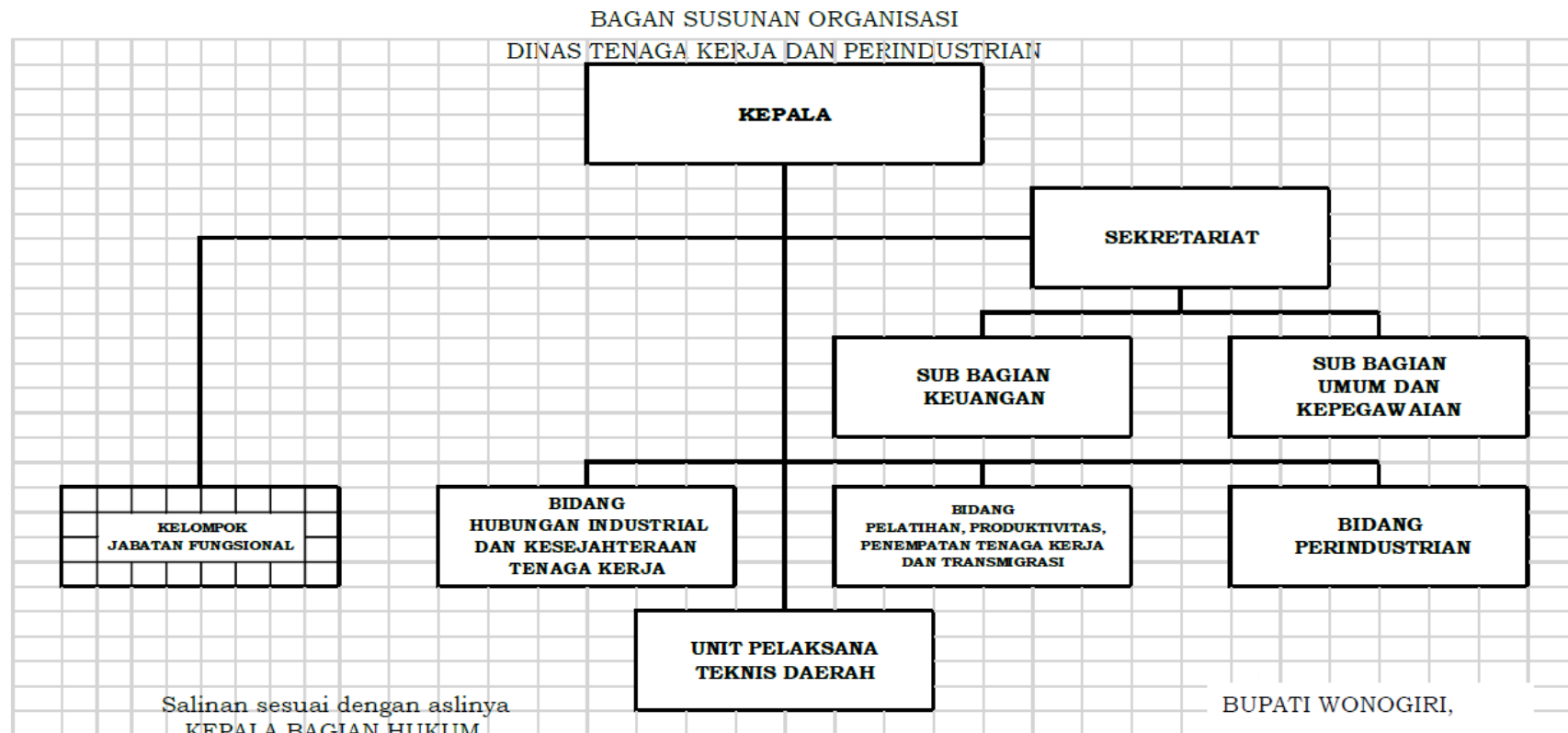
Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

5. Bidang Perindustrian

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perindustrian, Pengembangan Industri dan Informasi Industri).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogi

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum
 NIP. 19740519 199903 2 007

BUPATI WONOGIRI,
 ttd
 JOKO SUTOPO

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1. Angka Pengangguran yang Masih Relatif Tinggi

Aspek strategis dan permasalahan utama mengenai angka pengangguran di Kabupaten Wonogiri dapat dianalisis melalui beberapa poin berikut:

Aspek Strategis

a. Pengembangan Sektor Pertanian

Wonogiri dikenal sebagai daerah pertanian. Pengembangan teknik pertanian modern dan diversifikasi produk pertanian dapat meningkatkan lapangan kerja.

b. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Mendorong pembentukan IKM untuk menciptakan lapangan kerja baru. Program pelatihan keterampilan dan akses modal sangat penting.

c. Pariwisata

Potensi pariwisata alam dan budaya di Wonogiri dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran dengan meningkatkan sektor pariwisata.

d. Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.

e. Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Permasalahan Utama

a. Ketidakcocokan Keterampilan

Banyak pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

b. Kurangnya Peluang Kerja

Terbatasnya jumlah lapangan kerja, terutama untuk lulusan pendidikan tinggi.

c. Migrasi Tenaga Kerja

Banyak warga yang merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan, meninggalkan daerah dengan potensi yang belum dimanfaatkan.

d. Birokrasi dan Akses Modal

Kesulitan dalam mengakses modal usaha dan birokrasi yang rumit dapat menghambat pertumbuhan usaha baru.

e. Krisis Ekonomi

Situasi ekonomi yang tidak stabil, terutama pasca-pandemi, berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri tahun 2023 sebesar 1,92% kemudian mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 2,40% dan di tahun 2025 kembali turun menjadi 2,16%. Strategi yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Wonogiri. Fokus pada pengembangan keterampilan, dukungan terhadap IKM, serta pemanfaatan potensi pariwisata diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Menurut data Sakernas BPS tahun 2025 mencatat jumlah angkatan kerja sebanyak 685.334 orang dengan penduduk usia kerja sebanyak 871.154 orang, dan sekaligus angka tersebut menjadi dasar analisis dalam dokumen ini.

2. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Aspek strategis dan permasalahan utama dalam bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja, dan transmigrasi di Indonesia mencakup beberapa hal berikut:

1. Pelatihan Tenaga Kerja

Aspek Strategis:

- a. Penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri.
- b. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
- c. Pengembangan keterampilan digital dan soft skills.

Permasalahan Utama:

- a. Ketersediaan pelatihan yang berkualitas dan merata di seluruh daerah.
- b. Tingginya angka pengangguran meskipun ada pelatihan yang tersedia.
- c. Kurangnya akses pelatihan untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

1. Produktivitas Tenaga Kerja

Aspek Strategis:

- a. Peningkatan teknologi dan inovasi dalam proses kerja.
- b. Penerapan sistem manajemen yang efisien di perusahaan.
- c. Fokus pada sektor-sektor dengan potensi tinggi, seperti manufaktur dan teknologi informasi.

Permasalahan Utama:

- a. Rendahnya tingkat produktivitas dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
- b. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan yang dibutuhkan oleh industri.

- c. Kondisi kerja yang tidak optimal di beberapa sektor, seperti pertanian dan konstruksi.

2. Penempatan Tenaga Kerja

Aspek Strategis:

- a. Pengembangan sistem informasi tenaga kerja untuk mempermudah pencarian kerja.
- b. Penyusunan kebijakan yang mendukung mobilitas tenaga kerja antar daerah.
- c. Kerjasama dengan perusahaan untuk menciptakan peluang kerja.

Permasalahan Utama:

- a. Ketidaksesuaian antara lokasi pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.
- b. Stigma negatif terhadap pekerjaan di sektor tertentu.
- c. Kurangnya dukungan bagi tenaga kerja migran.

3. Transmigrasi

Aspek Strategis:

- a. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai di daerah transmigrasi.
- b. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi.
- c. Pembangunan ekonomi lokal untuk mendukung keberlangsungan hidup para transmigran.

Permasalahan Utama:

- a. Ketidakpastian mengenai keberhasilan program transmigrasi.
- b. Potensi konflik sosial antara pendatang dan penduduk lokal.
- c. Keterbatasan sumber daya untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

Mengatasi permasalahan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja, dan transmigrasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Inovasi serta kebijakan yang adaptif sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Permasalahan klasik berikutnya adalah ketika pencari kerja sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah diterima oleh perusahaan, mereka mudah sekali untuk memutuskan *resign*/keluar dari pekerjaan. Kejadian ini sering terjadi pada pencari kerja usia 19-25 tahun (setelah lulus sekolah). Menjadi refleksi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk bagaimana mempertahankan seseorang yang sudah diterima bekerja di perusahaan untuk tidak mudah *resign*. Salah satu

upaya yang dilakukan yakni dengan adanya *Career Class* yang membantu pencari kerja untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai dunia kerja, mulai dari persiapan melamar pekerjaan, membuat CV, teknik saat menghadapi interview, teknik mengerjakan psikotes, dsb.

Lalu untuk urusan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, masalah yang sering yakni kurangnya kesiapan dan kompetensi CPMI itu sendiri, karena bekerja di luar negeri pun juga harus memiliki kompetensi/skill yang handal.

3. UPTD BLK

Aspek strategis dan permasalahan utama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Wonogiri dapat dilihat dari beberapa perspektif:

Aspek Strategis:

1. **Penyelarasan Program Pelatihan:**
Menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri lokal, termasuk sektor unggulan di Wonogiri seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil.
2. **Peningkatan Kualitas Pelatihan:**
 - a. Meningkatkan kualitas instruktur melalui pelatihan dan sertifikasi.
 - b. Mengadopsi metode pelatihan yang lebih interaktif dan berbasis praktik.
3. **Kerja Sama dengan Sektor Swasta:**
 - a. Membangun kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menciptakan peluang kerja bagi lulusan pelatihan.
 - b. Mengadakan program magang atau praktik kerja di industri.
4. **Pengembangan Keterampilan Digital:**
Menyediakan pelatihan yang memfokuskan pada keterampilan digital dan teknologi informasi, agar lulusan siap menghadapi tantangan industri 4.0.
4. **Aksesibilitas dan Promosi:**
 - a. Meningkatkan aksesibilitas pelatihan bagi masyarakat di daerah terpencil.
 - b. Melakukan promosi aktif tentang program dan manfaat pelatihan yang ditawarkan.

Permasalahan Utama:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:**
 - a. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan fasilitas dan pelatihan yang berkualitas.
 - b. Kurangnya peralatan dan teknologi terbaru untuk pelatihan.

2. Tingkat Partisipasi yang Rendah:
 - a. Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan, terutama di kalangan generasi muda.
 - b. Stigma negatif terhadap jenis pekerjaan tertentu yang dianggap rendah.
3. Kualitas Lulusan:
 - a. Lulusan sering kali tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri.
 - b. Kurangnya keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja.
4. Pengangguran dan Penempatan Kerja:
 - a. Tingginya angka pengangguran di daerah meskipun ada pelatihan yang tersedia.
 - b. Kesulitan dalam menempatkan lulusan pelatihan ke dalam pekerjaan yang sesuai.
5. Miskomunikasi dengan Stakeholder:

Kurangnya komunikasi dan kerja sama antara UPTD BLK, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam merumuskan program yang efektif.

UPTD BLK Wonogiri memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah, namun perlu mengatasi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Aspek strategis dan permasalahan utama dalam bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Wonogiri terdiri dari beberapa poin penting sebagai berikut:

Aspek Strategis:

1. Penguatan Hubungan Industrial:
 - a. Meningkatkan dialog antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif.
 - b. Membentuk serikat pekerja yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak tenaga kerja.
2. Sosialisasi dan Edukasi:
 - a. Mengadakan program sosialisasi mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja serta peraturan ketenagakerjaan.
 - b. Memberikan pelatihan tentang negosiasi yang efektif bagi pekerja dan pengusaha.

3. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja:
 - a. Mengembangkan program kesejahteraan seperti jaminan kesehatan, perumahan, dan fasilitas pendidikan bagi tenaga kerja.
 - b. Mendorong perusahaan untuk menerapkan program kesejahteraan yang berkelanjutan.
4. Penerapan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Adil:
 - a. Memastikan penerapan kebijakan yang adil dan merata dalam upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
 - b. Mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
5. Pengembangan Skill dan Pelatihan:
 - a. Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompetitif.
 - b. Kolaborasi dengan UPTD BLK dan lembaga pelatihan lainnya untuk memfasilitasi kebutuhan skill.

Permasalahan Utama:

1. Ketidakpastian Kerja:

Banyak tenaga kerja yang dipekerjakan secara kontrak atau sementara, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pekerjaan dan kesejahteraan.
2. Kondisi Kerja yang Tidak Memadai:
 - a. Beberapa perusahaan belum memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang layak.
 - b. Lingkungan kerja yang buruk dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan pekerja.
3. Rendahnya Upah:

Banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar upah minimum yang ditetapkan, mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga.
4. Kurangnya Akses terhadap Jaminan Sosial:

Banyak tenaga kerja, terutama di sektor informal, yang tidak memiliki akses ke program jaminan sosial dan kesehatan.
5. Persepsi Negatif terhadap Serikat Pekerja:

Beberapa pengusaha memiliki persepsi negatif terhadap serikat pekerja, yang dapat menghambat dialog dan kerjasama.

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga masih menghadapi tantangan signifikan, tetapi juga memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi tersebut. Melalui strategi yang tepat, termasuk peningkatan dialog sosial, edukasi,

dan kebijakan yang berkeadilan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di daerah tersebut.

5. Bidang Perindustrian

Aspek strategis dan permasalahan utama dalam bidang perindustrian di Kabupaten Wonogiri dapat diuraikan sebagai berikut:

Aspek Strategis:

1. Pengembangan Sektor Unggulan:
 - a. Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor industri unggulan, seperti pertanian, pengolahan makanan, dan kerajinan tangan.
 - b. Mendorong inovasi dalam produk dan proses produksi.
2. Peningkatan Infrastruktur:
 - a. Membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi, untuk mendukung kegiatan industri.
 - b. Mengembangkan kawasan industri yang terencana dan berkelanjutan.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:
 - a. Menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor industri.
 - b. Kolaborasi dengan lembaga pelatihan dan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri.
4. Dukungan Kebijakan Pemerintah:
 - a. Menerapkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri, termasuk insentif bagi investasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).
 - b. Memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku industri.
5. Promosi dan Pemasaran Produk Lokal:
 - a. Meningkatkan upaya promosi produk lokal melalui pameran, festival, dan platform digital.
 - b. Mengembangkan brand produk lokal untuk meningkatkan daya saing.

Permasalahan Utama

1. Keterbatasan Modal:
 - a. Banyak industri, terutama UKM, yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan untuk pengembangan usaha.
 - b. Ketergantungan pada pinjaman dengan bunga tinggi dari rentenir.
2. Infrastruktur yang Tidak Memadai:
 - a. Keterbatasan infrastruktur yang mendukung, seperti jalan yang rusak dan jaringan listrik yang tidak stabil, menghambat aktivitas industri.

- b. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti gudang dan sistem logistik yang efisien.
- 3. Persaingan yang Ketat:
 - a. Persaingan dengan produk dari daerah lain atau negara lain yang lebih murah dan berkualitas, yang dapat mengancam keberlangsungan industri lokal.
 - b. Kurangnya inovasi dalam produk dan proses untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
- 4. Ketidakpastian Regulasi:
 - a. Perubahan regulasi yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri.
 - b. Keterbatasan informasi mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- 5. Kualitas Sumber Daya Manusia:
 - a. Keterbatasan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
 - b. Tingginya angka pengangguran meskipun ada permintaan tenaga kerja di sektor industri.

Bidang perindustrian di Kabupaten Wonogiri memiliki potensi besar untuk berkembang, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan strategi yang tepat, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang konsisten, diharapkan sektor industri di Wonogiri dapat tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

1.4 Landasan Hukum

LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2023 Nomor 36);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan gambaran umum yang melatar belakangi dasar penyusunan LKjIP, struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi di dalam pelaksanaan pembangunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, serta memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Capaian output program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.
9. Membandingkan antara capaian output program, kegiatan dan sub kegiatan pada 3 tahun terakhir.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

Dokumen pendukung lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.**

2.1.2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
- b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			Nilai Kematangan Organisasi	Index	44	44	45	45	46	46
		1.1	Meningkatnya kinerja Disnaker	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Index	75,17	75,20	75,50	76,50	77,50	78,50
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	60	65	70	75	81	81,50
				Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	Orang	1	1	2	3	4	5
				Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	1	1	1	1	1	1
				IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	90	90	91	91	91	91
2.	Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	95,73	95,90	96,15	96,40	96,70	97,00
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,27	4,10	3,85	3,60	3,30	3,00
		2.1	Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	54,43	55,16	56,36	57,20	58,03	61,19
				Besaran Kompetensi	%	9,55	11,46	13,37	15,28	17,19	19,10

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Calon Tenaga Kerja							
				Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	2,37	2,21	2,05	1,89	1,73	1,57
3.	Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro			Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	3,65	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15
		3.1	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Pengusaha	125	200	250	300	350	400

Sumber: Cascading RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, 2021-2026

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja ini memuat Tujuan, Sasaran dan Program yang telah tertuang dalam dokumen RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2021-2026. Dalam menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, disusun dalam satu bagian terstruktur dimana Program mengarah kepada Sasaran, dan Sasaran mengarah kepada Tujuan indikator dan target yang dijelaskan melalui tabel di bawah berikut ini:

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja (Tujuan, Sasaran dan Program)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				Nilai Kematangan Organisasi	Index	46
		1.1	Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Index	77,50
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	81
					Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	Orang	4
					Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	1
					IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	91

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	%	100
2.	Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,70
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,30
		2.1	Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58,03
				Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	17,19
				Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	1,73
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	58,03
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	7,1
			Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	%	1,21
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	13
3.	Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro			Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	4,05
		3.1	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Pengusaha	350
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	17,80
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	%	5
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	0,56

Sumber: e-SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, 2025

2.2.1.

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021-2026. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
(Sesuai Cascading PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026)

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	Index	KOD = (TNPDP / JPD) KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPDP = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah	Rekapitulasi Nilai Per Variabel Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
2.	Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	TKK = (Jumlah Penduduk yang Bekerja : Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	Badan Pusat Statistik
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	TPT = (Jumlah Pengangguran : Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	Badan Pusat Statistik
3.	Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	Rasio Penduduk yang Berwirausaha = (Jumlah pelaku usaha tahun n : Jumlah penduduk tahun n) x 100%	Bidang Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
4.	Meningkatnya kinerja Disnaker Kab. Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Index	Akumulasi penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Disnaker Kab. Wonogiri yang meliputi: 1.Perencanaan Kinerja (30) 2.Pengukuran Kinerja (30) 3.Pelaporan Kinerja (15) 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Nomor: T/446/700.1.2.7/V/2025
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.	Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan	Orang	Jumlah ASN yang ditunjuk untuk menjadi <i>role model</i> dalam menumbuhkembangkan birokrasi pemerintahan yang profesional untuk mendukung Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor: 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	Inovasi yang dijalankan untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	<u>Inovasi Super Gen-Z:</u> Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor: 003 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Upgrading <i>Softskill</i> untuk Generasi Z (Super Gen-Z) Kabupaten Wonogiri tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. <u>Inovasi WRP (Work Readiness Programme):</u> Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor: 649 Tahun 2022 tentang Daftar Peserta Pelatihan Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT) melalui Pelatihan <i>Work Readiness Programme</i> (WRP) Tahun 2022
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	(Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuesioner yang terisi) x 0,083 *1/12 = 0,083 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Tabel Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat per Responden dan per Unsur Pelayanan pada Pelayanan Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	$(\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan} / \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar}) \times 100\%$	Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja yang terdaftar.
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	$(\text{Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten} / \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar}) \times 100\%$	Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah calon tenaga kerja yang kompeten dan jumlah pencari kerja yang terdaftar.
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	$(\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja} / \text{jumlah perusahaan}) \times 100\%$	Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah sengketa pengusaha pekerja dan jumlah perusahaan.
6.	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Pengusaha	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) pada tahun n	Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Sumber: e-SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, 2025

2.3 Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai apayang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Namun, selama tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan Perubahan karena pergeseran anggaran dan pergantian pejabat.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PERUBAHAN 2025)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	46 indeks
2.	Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,70%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,30%
3.	Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Rasio penduduk yang berwirusaha	4,05%
4.	Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	77,50 indeks
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	81 angka
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	4 Orang

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 angka
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	91 angka
5.	Menurunnya pengangguran	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	58,03%
		Besaran kompetensi calon tenaga kerja	17,19%
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	1,73%
6.	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	350 Pengusaha

Tabel 2.5
Anggaran pada Perjanjian Kinerja (PERUBAHAN 2025)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.193.913.309	APBD
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 4.159.800	APBD
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 780.967.564	APBD
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 133.445.110	APBD
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 141.368.508	APBD
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 23.775.000	APBD
7.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 10.129.900	APBD
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 15.368.600	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai atau < 100% dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Nilai Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025

No	Kategori / Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$\geq 91\%$;
2	Baik	76 – 90,99%;
3	Cukup	66 – 75,99%;
4	Kurang	51 – 65,99%;
5	Sangat Kurang	$\leq 50,99\%$.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaiankinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Tahun 2025 ini didasarkan pada:

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator
- Tujuan 2 terdiri dari 2 indikator
- Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator

- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Berikut rumus/formula untuk menginterpretasikan capaian kinerja pada dokumen LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025:

Rumus:

1. Semakin tinggi realisasi sama dengan pencapaian kinerja semakin baik.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi sama dengan pencapaian kinerja semakin buruk.

$$\frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Untuk mengetahui sejauh mana realisasi yang dicapai dari Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri di tahun 2025, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
(TUJUAN DAN SASARAN)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	Index	46	37	80,43%	Baik	Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Wonogiri - Dokumen: Hasil Validasi Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
1.1	Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Index	77,50	78,30	101,03%	Sangat Baik	Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri - Dokumen: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Nomor: T/446/700.1.2.7/V/2025
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	81	80,67	99,59%	Sangat Baik	Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri - Dokumen: Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan	Orang	4	4	100%	Sangat baik	Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri - Dokumen: Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	1	2	200%	Sangat Baik	Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri <u>Inovasi Super Gen-Z:</u> - Dokumen: Surat Keputusan Kepala Dinas

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor: 003 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Upgrading <i>Softskill</i> untuk Generasi Z (Super Gen-Z) Kabupaten Wonogiri tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. <u>Inovasi WRP (<i>Work Readiness Programme</i>):</u> - Dokumen: Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor: 649 Tahun 2022 tentang Daftar Peserta Pelatihan Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT) melalui Pelatihan <i>Work Readiness Programme</i> (WRP) Tahun 2022.
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	91	92,15	101,26%	Sangat Baik	Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri - Dokumen: Tabel Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat per Responden dan per Unsur Pelayanan pada Pelayanan Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025
2.	Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,70%	97,84%	101,18%	Sangat Baik	Badan Pusat Staistik - Dokumen: Berita Resmi Statistik No.31/12/3312/Th. XI, 5 Desember 2025 Keadaan Ketenagakerjaan Wonogiri Agustus 2025

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,30	2,16	133,33%	Sangat Baik	Badan Pusat Statistik - Dokumen: Berita Resmi Statistik No.31/12/3312/Th. XI, 5 Desember 2025 Keadaan Ketenagakerjaan Wonogiri Agustus 2025
2.1	Menurunnya pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58,03%	77,98%	134,38%	Sangat Baik	Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Formula: $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$ - Dokumen: Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja yang terdaftar
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	15,28%	32,02%	209,55%	Sangat Baik	Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Formula: $\frac{\text{Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$ - Dokumen: Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah calon tenaga kerja yang kompeten dan jumlah pencari kerja yang terdaftar.
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	1,89%	0,62%	167,19%	Sangat Baik	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Formula:

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$ - Dokumen: Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah sengketa pengusaha pekerja dan jumlah perusahaan.
3.	Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Rasio penduduk yang berwirausaha	%	4,05	4,56	112,59%	Sangat Baik	Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Formula: $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha tahun n}}{\text{Jumlah penduduk tahun n}} \times 100\%$ - Dokumen: Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah pelaku usaha dan jumlah penduduk.
3.1	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Peng usaha	300	319	106,33%	Sangat Baik	Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Formula: Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) pada tahun n - Dokumen: Lembar Monev PK Triwulanan (Triwulan I-IV Tahun 2025) yang memuat data jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Sumber: e-SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, 2025

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TUJUAN I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Kinerja: Nilai Kematangan Organisasi

Penjelasan:

Penilaian kematangan organisasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari Nilai Kematangan Organisasi di suatu OPD. Nilai Kematangan Organisasi menunjukkan bahwa suatu organisasi publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan oleh organisasi tersebut. Kematangan Perangkat Daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tersebut pada setiap variabel dan indikator. Setiap variabel dibagi ke dalam 5 level dan setiap level mempunyai indikator. Penilaian Perangkat Daerah dilakukan terhadap:

1. Tata Laksana (Proses Bisnis);
2. Budaya Organisasi;
3. Inovasi.

Penilaian ketiga komponen tersebut dijabarkan kembali dengan berdasarkan variabel-variabel di bawah ini:

1. Perencanaan;
2. Monitoring dan pengendalian;
3. Penjaminan mutu layanan;
4. Standar operasional prosedur;
5. Pendidikan dan pelatihan;
6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah;
7. Manajemen sumber daya yang terukur;
8. Manajemen resiko;
9. Pengukuran kinerja;
10. Pengembangan inovasi layanan; dan
11. Budaya organisasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025 telah melalui penilaian kematangan organisasi yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri, dengan target nilai untuk tahun 2025 sebesar 46 dan tercapai sebesar 37 (80,43%). Hal ini belum memenuhi target karena terjadi *miss* saat penilaian, dokumen telah lengkap, namun dikategorikan ke dalam nilai yang rendah.

SASARAN I: Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Indikator:

1. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wongiri

Nilai SAKIP untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2024 ini belum dirilis oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri, karena penilaian 2025 belum berlangsung dan nilai SAKIP yang dilaporkan dalam dokumen LKjIP 2025 ini masih menggunakan nilai SAKIP tahun 2024. Komponen penilaian SAKIP telah tertuang dalam Lembar Hasil Evaluasi (LHE) penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja (30%)
- b. Pengukuran Kinerja (30%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%)
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Nomor T/446/700.1.2.7/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, untuk penilaian SAKIP tahun 2024, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Nilai Komponen AKIP 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,05	78,30
			BB	BB

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Disnakerin 2024

Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri di tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 78,30 dari target sebesar 77,50. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut mengalami peningkatan dikarenakan dapat memenuhi apa yang menjadi rekomendasi perbaikan atas penilaian SAKIP. Rekomendasi (sesuai dengan LHE SAKIP 2024) Inspektorat tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi atau sosialisasi penyusunan perencanaan kinerja organisasi dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri agar seluruh pegawai memahami prosedur penyusunannya.
- b. Menegur petugas yang diberikan kewenangan atau amanat untuk mengunggah dokumen perencanaan kinerja pada laman resmi Perangkat Daerah secara tepat waktu agar tidak terjadi rekomendasi berulang.
- c. Menyelenggarakan forum OPD / *Focus Group Discussion* (FGD) ketika penyusunan dokumen perencanaan agar penyusunan atau perumusan dokumen perencanaan beserta perubahannya dapat mengakomodir seluruh Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat dengan jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai (Indikator Kinerja) dengan rumusan hasil (Tujuan/Sasaran).
- d. Merumuskan target kinerja dengan cara mengidentifikasi kelemahan pengendalian atas capaian kinerja yang tidak tercapai atau melebihi nilai kewajaran dengan menuangkannya dalam register risiko agar mendapat target yang tepat yang mencerminkan kondisi nyata.
- e. Menyusun rencana aksi perubahan ketika terjadi perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mempertimbangkan hasil pemantauan kinerja yang dilaksanakan secara berkala serta menerapkan manajemen risiko sehingga mampu memberika rekomendasi perbaikan manajemen kinerja.
- f. Menjadikan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya beserta analisis yang memadai sebagai strategi penyesuaian kebijakan untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien yang tertuang secara detail dalam pelaporan kinerja.
- g. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebelumnya untuk perbaikan dalam perumusan target dan indikator kinerja perangkat daerah maupun individu demi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Tujuan adanya penilaian Indeks Profesionalitas ASN ini untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Manfaat dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN ini antara lain:

- a. Bagi pegawai yakni digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN.
- b. Bagi instansi yakni digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
- c. Bagi masyarakat yakni digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri di tahun 2025 menetapkan target Indeks Profesionalitas sebesar 81. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, Data Pendaftaran Ulang PNS, data yang terhimpun pada unit pengelola kepegawaian dan Pegawai ASN yang bersangkutan. Dan setelah melalui proses perhitungan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, maka didapat angka Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebesar 80,67 dari target sebesar 81. Hal ini telah melampaui target yang telah ditentukan, namun secara kategori dalam tingkatan Indeks Profesionalitas ASN masih tergolong kategori sedang. Namun, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN ini dengan mendorong pegawai-pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seperti diklat, seminar, workshop, juga diberlakukan pemberian *Reward and Punishment*.

Tabel 3.5
Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN menurut
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	60 ke bawah	Sangat Rendah

Tabel 3.6
Hasil Rekap Indeks Profesionalitas ASN 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

REKAPITULASI IP ASN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	Jabatan	IP Target Tahun 2024	NILAI PENGUKURAN IP ASN DARI BKN (myasn.bk.go.id)									
					Total		Pendidikan		Kompetensi		Kinerja		Disiplin	
					Maksimal	Perolehan	Maksimal	Perolehan	Maksimal	Perolehan	Maksimal	Perolehan	Maksimal	Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WIYANTO S.H, M.Si.	19700904 199803 1 009	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	81	100	75	25	25	40	20	30	25	5	5
2	SAROSA, S.IP., M.M.	19680914 199003 1 009	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	81	100	85,5	25	25	40	30,5	30	25	5	5
3	HARMASTUTI TRIATMAJA, SH, MM	19711205 200604 2019	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	81	100	75	25	25	40	20	30	25	5	5
4	JOKO PRAMONO, S.Si	19800809 200604 1 016	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81	100	70	25	20	40	20	30	25	5	5
5	PURBANINGRUM DWI AZASI S Sos, MM	19710422 200502 2 003	Kepala Bidang Perindustrian	81	100	80	25	25	40	25	30	25	5	5
6	JOKO PRIHARJANTO,S.Sos	19710227 200604 1 013	Pengantar Kerja Ahli Muda	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
7	HARNI, A.Md	19711219 199803 2 005	Pengantar Kerja Ahli Muda	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
8	M. MUSLIH, SH	19671230 199803 1 008	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
9	ADI ROHMADI ABDULLAH, ST	19830929 201001 1 019	Ka.UPTD Balai Latihan Kerja	81	100	75	25	25	40	20	30	25	5	5
10	ENIE DWI KARYANINGRUM SKM, M.M.	19740707 199702 2 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian	81	100	76	25	25	40	21	30	25	5	5
11	AGUNG SUSILA, S.T., M.Pd.	19850722 201001 1 023	Kasubag Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja	81	100	80	25	25	40	25	30	25	5	5
12	DIAH MUSTIKA CAHYANINGSUCI STP.,M.Si	19800710 200604 2 012	Kasubag Keuangan	81	100	75	25	25	40	20	30	25	5	5
13	SUGIYANTI, SE	19830927 201001 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	75	25	25	40	20	30	25	5	5
14	TRI HANDAYANI, S.Sos.	19680404 199103 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	75	25	25	40	20	30	25	5	5
15	IKA KARTIKOWATI, S.Sos	19710226 200604 2 011	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	85	25	25	40	30	30	25	5	5
16	FARIDA YULIKA ARTATI, SE	19670716 199803 2 004	Pengantar Kerja Madya	81	100	90	25	20	40	35	30	30	5	5
17	SWARI HADININGSIH, S.Sos.	19831111 201101 2 003	Pengantar Kerja muda	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
18	WINARTO, SP	19851123 201001 1 011	Instruktur	81	100	83	25	20	40	33	30	25	5	5
19	DHANANG TRIWIBOWO, A.Md	198690406 202012 1 001	Pengelola Layanan Operasional	81	100	90	25	25	40	35	30	25	5	5

20	GINANJAR BUDHI UTOMO S.E	199304142020121000	Ahli Pertama- Pengantar Kerja	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
21	AGUNG PURNOMO S.H	199708102020121002	Ahli Pertama- Mediator Hubungan industrial	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
22	DANIEL HARI BUDIMAN S.E	199112222020121007	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	90	25	25	40	35	30	25	5	5
23	AKHMAD FATHONI S.T	19931005 202012 1 005	Instruktur Ahli Pertama	81	100	85	25	20	40	35	30	25	5	5
24	APIF NUR IMAM, S.T	19930413 202012 1 004	Instruktur Ahli Pertama	81	100	85	25	20	40	35	30	25	5	5
25	SYAIFUDIN FAUZI, S.T	19960122 202012 1 006	Instruktur Ahli Pertama	81	100	85	25	20	40	35	30	25	5	5
26	LIA INDRANI, S.T	19970815 202012 2 008	Instruktur Ahli Pertama	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
27	SISWANTO BAYU HARTONO, A.Md	19900717 202012 1 002	Instruktur Penyelia	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
28	NOVI ARIYANTO, A.Md	19911126 202012 1 005	Instruktur Penyelia	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
29	QORIDHAH ROSITA DEWI ,A.MdT	19961009 202012 2 009	Instruktur Penyelia	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
30	ZULAIFAH AZIZAH MIMRAATUN ,A.MdT	19970506 202012 2 005	Instruktur Penyelia	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
31	ARIS BUDI SETIARSO S.E.	19871110 202203 1 002	Ahli Pertama- Pengantar Kerja	81	100	80	25	20	40	30	30	25	5	5
32	DWI WAHYU PUJI LESTARI S.Psi	19960310 202203 2 010	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	85	25	25	40	30	30	25	5	5
33	ADELIA SHEILA ANINDITHA S.I.Kom	19970425 202203 2 012	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama	81	100	85	25	20	40	35	30	25	5	5
34	WAHYU TRI WINARNI SE, MM	19750612 201001 2 016	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	81	100	85,5	25	25	40	30,5	30	25	5	5
35	DODIT APRIAN SE	19880427 200501 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	90	25	25	40	35	30	25	5	5
36	DELTA REFINDA S.T.	19960412 202203 2 015	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	75	25	25	40	20	30	25	5	5
37	SUGINO, S.IP.	19750919 201001 1 011	Penelaah Teknis Kebijakan	81	100	70	25	20	40	20	30	25	5	5
RATA-RATA						80,6756757								
CAPAIAN TARGET (%)						99,5995996								



Gambar 3.1
Kegiatan Peningkatan IP ASN pada Pegawai
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri



Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah



Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan

Untuk mendukung terciptanya birokrasi yang profesional dan terselenggaranya reformasi birokrasi, maka diperlukan Agen Perubahan yang mampu menjalankan peran sebagai berikut:

- a) Memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b) Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- c) Memberikan alternatif solusi kepada para pegawai/pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- d) Membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Perangkat Daerah yang terkait dengan proses perubahan;
- e) Menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah;
- f) Menjadi teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berfikir, bertindak laku dan berprestasi; dan
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

SK Agen Perubahan ini telah disusun sejak tahun 2021, dimana saat itu yang menjadi role model dalam Agen Perubahan masih 1 orang yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan seiring berjalannya waktu, jumlah Agen Perubahan hingga tahun 2025 sebanyak 4 orang yakni:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Kepala UPTD BLK
4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.

Jadi, sampai dengan akhir tahun 2025 ini tercatat sebanyak 4 orang yang menjadi Agen Perubahan dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor 259 Tahun 2024

tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025, sedangkan untuk target yang menjadi Agen Perubahan di tahun 2025 sebanyak 4 orang. Maka, dalam hal ini telah mencapai target. Agen Perubahan di tahun 2025 dan Rencana Tindak Agen Perubahan tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

WIYANTO, S.H., M.Si							
NO.	BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Profesional	Meningkatnya keberhasilan program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka pengangguran menurun	Masyarakat / Pencari Kerja	Rapat koordinasi / <i>morning briefing</i> dengan staf sebelum memulai aktivitas pekerjaan	1 tahun	Dilakukan secara berkala, selama jam kerja
2	Disiplin	Tercapainya tujuan kegiatan yang disusun	Koordinasi dan kerjasama tim yang baik	Masing-masing staf ASN	Saling mengingatkan rekan staf untuk presensi datang pagi, apel, dan pulang sore pada aplikasi <i>Hadirku</i> serta menyusun capaian aktivitas harian pada aplikasi <i>SiTampan</i>	1 tahun	Dilakukan setiap hari kerja dan selama jam kerja
3	Integritas	Terselesaikannya urusan para pengguna layanan	Penolakan gratifikasi dalam bentuk apapun	Pengguna layanan	Memproses kepengurusan administrasi / dokumen kebutuhan pengguna layanan	1 tahun	Dilakukan setiap hari kerja dan selama jam kerja
4	Akuntabel	Terlaksananya Kegiatan maupun Sub Kegiatan	Unggahan dokumentasi Kegiatan / Sub Kegiatan di media sosial Instagram / Twitter	Kegiatan / Sub Kegiatan yang dilaksanakan	Mengunggah dokumentasi berupa foto atau video hasil Kegiatan / Sub Kegiatan di media sosial Instagram / Twitter	1 tahun	Dilakukan setelah terlaksananya Kegiatan / Sub Kegiatan

JOKO PRAMONO, S.Si

NO.	BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Berorientasi pelayanan	Meningkatnya komitmen pemberian pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Masyarakat / pencari kerja	Mengadakan pelatihan-pelatihan di kecamatan sebagai wujud responsivitas kepada publik, misalnya pelatihan menjahit atau tata boga di kecamatan	1 tahun	Dilakukan secara berkala
2	Akuntabel	Meningkatnya tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan	Penggunaan barang milik negara / aset daerah secara tanggung jawab, efektif dan efisien	Barang milik negara / aset daerah	Menggunakan barang milik negara / aset daerah dengan lebih bijak dan ikut merawat barang tersebut, seperti misalnya mematikan AC ruangan jika tidak dipakai	1 tahun	Dilakukan selama jam kerja
3	Adaptif	Terwujudnya inovasi dalam menghadapi perubahan	Terlaksananya inovasi WRP (<i>Work Readiness Programme</i>)	Peserta pelatihan dari lapisan masyarakat	Pembuatan kegiatan pelatihan yang inovatif, seperti Pelatihan <i>Digital Marketing</i> di kecamatan dan desa.	1 tahun	Dilakukan setiap hari kerja dan selama jam kerja

ADI ROHMADI ABDULLAH, S.T

NO.	BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	SASARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Berorientasi pelayanan	Meningkatnya komitmen pemberian pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	Tingginya antusias masyarakat terhadap kegiatan pelatihan	Masyarakat / pencari kerja	Menyediakan admin sosial media yang aktif, untuk membantu menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar kegiatan pelatihan di platform sosial media	1 tahun	Dilakukan setiap hari kerja dan selama jam kerja

					Instagram maupun Twitter		
2	Harmonis	Terwujudnya sikap saling peduli dan menghargai perbedaan	Terbangunnya lingkungan kerja yang kondusif	Semua ASN dan Non ASN di lingkungan UPTD BLK Wonogiri	Selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai agar menyelesaikan target pekerjaan melalui Apel Pagi dan melalui Grup <i>Whatsapp</i>	1 tahun	Dilakukan setiap hari kerja dan selama jam kerja
3	Adaptif	Terwujudnya inovasi dalam menghadapi perubahan	Adanya sikap proaktif dan mendukung inovasi	Peserta pelatihan dari lapisan masyarakat	Mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang inovatif dengan menerapkan inovasi Super Gen-Z, agar peserta pelatihan lebih mudah memahami materi	1 tahun	Pelaksanaan inovasi yang diolah secara mandiri di lingkungan UPTD BLK Kab. Wonogiri

WAHYU TRI WINARNI, S.E., M.M

NO.	BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	SASARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Berorientasi pelayanan	Meningkatnya komitmen pemberian pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Masyarakat / pencari kerja	Memberi layanan kepada pencari kerja untuk bekerja di luar negeri	1 tahun	Dilakukan setiap hari kerja dan selama jam kerja
2	Adaptif	Terwujudnya inovasi dalam menghadapi perubahan	Proaktif terhadap inovasi yang telah dijalankan	Masing-masing staf ASN	Menjadi narasumber dalam kegiatan “ <i>Ngos-Ngosan</i> ” (Ngobrol santai ketenagakerjaan) melalui media sosial Instagram	1 tahun	Dilakukan secara berkala
3	Kolaboratif	Terwujudnya kerjasama yang sinergis	Adanya keterbukaan dalam bekerja sama	Pegawai ASN dan Non ASN	Saling mengingatkan rekan staf untuk presensi datang pagi, apel, dan pulang sore pada aplikasi <i>Hadirku</i> serta menyusun capaian aktivitas harian pada aplikasi <i>SiTampan</i>	1 tahun	Dilakukan setiap hari kerja dan selama jam kerja

4. Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah memiliki inovasi-inovasi yang diterapkan untuk mendukung kinerja dan mencapai efektif efisien dalam melakukan suatu pekerjaan dan masih berjalan hingga tahun 2025. Dalam mendukung peningkatan kinerja, target penerapan inovasi ini sebanyak 1 inovasi yang dijalankan dan selama tahun 2025 telah menjalankan sebanyak 2 inovasi dan masing-masing tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Maka, untuk tujuan Meningkatnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dengan indikator Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah tercapai.

Tabel 3.8
INOVASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2025

NO.	NAMA INOVASI	PENJELASAN	KEADAAN SEBELUM (BEFORE)	KEADAAN SESUDAH (AFTER)
1.	SUPER GEN-Z	Super Gen-Z yakni Inovasi yang dikembangkan oleh UPTD BLK terkait dengan metode pembelajaran saat penyampaian materi pelatihan bagi peserta pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Wonogiri.	Belum terselenggara Program <i>Upgrading Softskill</i>	Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di UPTD BLK mengaplikasikan inovasi Super Gen-Z dengan didasari Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor: 003 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Upgrading Softskill untuk Generasi Z (Super Gen-Z) Kabupaten Wonogiri tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

NO.	NAMA INOVASI	PENJELASAN	KEADAAN SEBELUM (BEFORE)	KEADAAN SESUDAH (AFTER)
2.	WRP (<i>Work Readiness Program</i>)	Program WRP (<i>Work Readiness Programe</i>) dimana program ini menysasar ke penyiapan calon tenaga kerja dengan turun ke SMK-SMK agar mereka siap kerja lebih dini.	Belum terselenggara Inovasi WRP (<i>Work Readiness Program</i>)	Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ini dengan mengaplikasikan Inovasi WRP (<i>Work Readiness Program</i>) agar masyarakat/pencari kerja yang dilatih lebih siao menghadapi dunia kerja dengan memberikan materi-materi dan praktik seputar ketanagkerjaan

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah melakukan pengukuran terhadap IKM dalam kaitannya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. IKM ini didapat dari penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana tersedia pelayanan-pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat (Pembuatan Kartu Kuning/AK-1, Rekomendasi CPMI, dsb).

Pengguna layanan mendapat akses link bit.ly untuk kemudian diisi sesuai dengan penilaian layanan yang didapat kemudian meng-*submit* link tersebut. Admin akan merekap dan menghitung IKM secara per bulan. Di tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menetapkan target sebesar 91 dan pada akhir tahun tercapai sebesar 92,15. Untuk analisis pengolahan Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, tersaji dalam tabel sebagai berikut

TABEL 3.9
TABEL PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2025

JANUARI 2024

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
 ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
 TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3,92	3,60	3,60	3,68	3,60	4,00	3,44	3,60	3,60
2	3,60	3,47	3,87	3,87	3,87	4,00	3,73	3,60	3,47
3	3,68	3,52	3,52	3,60	3,68	4,00	3,44	3,68	3,52
4	3,68	3,60	3,76	3,84	3,76	4,00	3,84	3,68	3,84
5	3,76	3,44	3,60	3,76	3,84	4,00	3,44	3,44	3,60
6	3,52	3,60	3,52	4,00	3,60	4,00	3,52	3,44	3,44
7	3,68	3,60	3,60	3,52	3,52	4,00	3,68	3,44	3,60
8	3,44	3,73	3,52	3,60	3,44	4,00	3,28	3,60	3,52
9	3,52	3,36	3,44	3,76	3,44	4,00	3,68	3,84	3,52
10	4,00	3,68	3,84	3,92	3,76	4,00	3,84	3,68	3,76
11	3,84	3,68	3,76	3,68	3,68	4,00	3,60	3,68	3,52
12	3,68	3,60	3,60	3,84	3,92	4,00	3,76	3,92	3,76
13	3,60	3,60	3,36	3,68	3,52	4,00	3,52	3,44	3,36
14	3,84	3,60	3,68	3,76	3,76	4,00	3,68	3,68	3,84
15	3,76	3,68	3,60	3,84	3,76	4,00	3,60	3,60	3,68
16	3,84	3,60	3,68	3,76	3,76	4,00	3,68	3,68	3,84
Jumlah Nilai Per Unsur	59,36	57,36	57,95	60,11	58,91	64,00	57,73	58,00	57,87
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,710	3,585	3,622	3,757	3,682	4,000	3,608	3,625	3,617
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,412	0,398	0,402	0,417	0,409	0,444	0,401	0,403	0,40
IKM Unit Pelayanan									

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3,60	3,44	3,52	3,60	3,52	4,00	3,52	3,52	3,52	
2	3,76	3,60	3,60	3,84	3,92	4,00	3,76	3,60	3,68	
3	3,68	3,60	3,68	4,00	3,84	4,00	3,60	3,76	3,68	
4	3,92	3,36	3,60	3,68	3,76	4,00	3,60	3,36	3,68	
5	3,86	3,36	3,68	3,84	3,68	4,00	3,52	3,36	3,52	
6	3,68	3,68	3,52	3,76	3,92	4,00	3,68	3,52	3,82	
7	3,60	3,68	3,36	3,84	3,60	4,00	3,60	3,52	3,52	
8	3,76	3,68	3,76	3,84	3,84	4,00	3,52	3,60	3,66	
9	3,84	3,60	3,60	3,76	3,76	4,00	3,60	3,52	3,52	
10	3,77	3,43	3,66	3,89	3,77	4,00	3,66	3,43	3,76	
11	3,60	3,52	3,76	3,92	3,68	4,00	3,60	3,52	3,52	
12	3,56	3,64	3,73	4,00	3,73	4,00	3,82	3,56	3,73	
13	3,84	3,68	3,68	3,84	3,68	4,00	3,76	3,60	3,52	
14	3,76	3,60	3,68	3,68	3,68	4,00	3,52	3,73	3,68	
15	3,80	3,70	3,50	3,70	3,60	4,00	3,60	3,70	3,80	
16	3,40	3,50	3,76	3,50	3,60	4,00	3,60	3,60	3,50	
Jumlah Nilai Per Unsur	59,43	57,07	58,09	60,69	59,58	64,00	57,96	56,89	58,11	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,714	3,567	3,631	3,793	3,724	4,000	3,622	3,556	3,632	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,413	0,396	0,403	0,421	0,414	0,444	0,402	0,395	0,40	3,693 *)
IKM Unit Pelayanan										92,331 **)

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
2. NRR : Nilai rata-rata
3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 28 Februari 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI
WYANTO, SH., M.Si.
NIP. 69700904 199803 1 009

MARET 2024

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4,00	3,75	3,50	3,25	3,75	4,00	3,75	3,25	3,50	
2	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	4,00	3,50	3,50	3,00	
3	4,00	3,00	3,00	3,00	3,25	4,00	3,25	3,00	3,25	
4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
5	4,00	3,33	3,67	3,17	3,17	4,00	3,17	3,17	3,17	
6	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	3,50	3,50	3,50	
7	4,00	3,40	3,80	3,40	3,60	4,00	3,60	3,40	3,20	
8	4,00	4,00	4,00	3,75	3,75	4,00	3,75	3,50	3,50	
9	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	4,00	3,50	
10	4,00	3,86	4,00	3,86	3,86	4,00	3,86	4,00	3,71	
11	4,00	3,50	4,00	4,00	3,50	4,00	3,50	4,00	4,00	
12	4,00	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
13	4,00	3,50	3,75	3,50	3,50	4,00	3,25	3,50	3,75	
14	3,67	3,33	3,33	3,33	3,33	4,00	3,33	3,33	3,33	
15	4,00	3,67	3,67	4,00	3,33	4,00	3,67	4,00	3,67	
16	4,00	3,57	3,71	3,71	3,57	4,00	3,71	3,43	3,57	
Jumlah Nilai Per Unsur	63,67	57,66	59,93	57,97	57,61	64,00	57,34	57,58	56,65	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,979	3,604	3,746	3,623	3,601	4,000	3,584	3,599	3,541	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,442	0,400	0,416	0,403	0,400	0,444	0,398	0,400	0,39	3,697
IKM Unit Pelayanan										92,433
										*)
										**)

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00
2	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50
3	3,50	3,50	4,00	3,50	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50
4	3,33	3,67	3,67	3,67	3,67	4,00	4,00	3,67	3,67
5	4,00	4,00	4,00	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	3,33	3,33	3,67	3,67	3,67	4,00	3,70	3,67	3,33
7	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,67	3,40	4,00
8	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00
9	4,00	4,00	3,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10	3,73	3,47	3,47	3,47	3,33	4,00	4,00	3,33	3,47
11	3,68	3,68	3,84	3,84	3,84	4,00	3,33	3,68	3,68
12	3,20	4,00	4,00	4,00	3,84	4,00	3,50	3,68	4,00
13	3,20	3,67	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,20
14	4,00	4,00	4,00	3,73	3,73	4,00	3,67	3,33	4,00
15	3,60	3,47	3,60	3,87	3,87	4,00	4,00	3,60	3,73
16	3,80	3,40	3,60	3,60	3,60	4,00	4,00	3,20	3,40
Jumlah Nilai Per Unsur	56,88	57,69	58,34	58,54	59,54	64,00	58,87	57,55	58,48
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,555	3,606	3,646	3,659	3,721	4,000	3,679	3,597	3,655
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,395	0,401	0,405	0,407	0,413	0,444	0,409	0,400	0,406
IKM Unit Pelayanan									91,997

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
2. NRR : Nilai rata-rata
3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 30 April 2025
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
WIYANTO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700904 199803 1 009

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	3,80	4,00	3,80	4,00	3,33	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	3,67	3,80	3,67	3,67	3,67	4,00	3,33	3,67	3,67	3,67
4	3,60	3,60	3,40	3,40	3,40	4,00	3,60	3,60	3,60	3,40
5	3,80	3,80	3,80	3,00	3,80	4,00	3,00	3,71	3,00	3,00
6	3,33	3,60	3,80	3,33	3,33	4,00	3,67	3,33	3,67	3,67
7	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	4,00	3,71	3,67	3,33	3,33
8	3,80	3,80	3,80	4,00	3,80	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
10	3,75	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
11	3,76	3,80	3,76	3,00	3,50	4,00	4,00	3,80	3,50	3,50
12	3,75	3,25	3,45	3,75	3,75	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
13	3,71	3,57	3,43	3,57	3,29	4,00	3,43	3,57	3,43	3,43
14	3,50	3,67	3,67	3,67	3,33	4,00	3,33	3,33	3,33	3,33
15	3,80	3,50	3,50	3,50	3,75	4,00	3,80	4,00	3,90	3,90
16	3,43	3,57	3,57	3,57	4,00	4,00	4,00	3,29	3,29	3,29
Jumlah Nilai Per Unsur	58,87	58,63	58,31	57,13	57,62	64,00	57,37	57,47	56,01	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,679	3,664	3,644	3,570	3,601	4,000	3,586	3,592	3,501	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,409	0,407	0,405	0,397	0,400	0,444	0,398	0,399	0,389	3,649 *)
IKM Unit Pelayanan	91,216 **)									

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
2. NRR : Nilai rata-rata
3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 30 Mei 2025
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,
WIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700904 199803 1 009

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U9	U11	U12	
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	
1	3,73	3,60	3,73	3,87	3,73	4,00	3,87	3,73	3,73	
2	4,00	3,87	3,87	3,87	3,73	4,00	4,00	4,00	4,00	
3	3,84	4,00	3,84	3,84	3,84	4,00	3,52	3,84	3,68	
4	4,00	3,20	3,20	3,20	3,20	4,00	3,20	3,20	3,20	
5	3,40	3,30	3,40	3,50	3,30	4,00	3,40	3,50	3,30	
6	3,47	3,60	3,87	3,87	3,47	4,00	3,73	3,60	3,87	
7	3,60	3,60	3,60	3,52	3,36	4,00	3,36	3,36	3,44	
8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,40	3,60	3,56	
9	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
10	3,73	3,47	3,47	3,33	3,33	4,00	3,47	3,33	3,47	
11	3,68	3,68	3,84	3,84	3,68	4,00	3,84	3,68	3,68	
12	3,20	3,60	4,00	3,60	3,30	4,00	4,00	4,00	3,68	
13	3,20	4,00	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	3,70	3,20	
14	3,60	4,00	3,70	3,73	4,00	4,00	3,73	3,50	3,13	
15	3,60	3,47	3,60	3,87	3,47	4,00	3,87	3,60	3,73	
16	3,80	3,40	3,60	3,60	3,40	4,00	3,60	3,20	3,40	
Jumlah Nilai Per Unsur	58,85	58,78	59,31	59,63	57,81	64,00	58,99	57,85	57,07	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,678	3,674	3,707	3,727	3,613	4,000	3,687	3,615	3,567	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,409	0,408	0,412	0,414	0,401	0,444	0,410	0,402	0,396	3,697 *)
IKM Unit Pelayanan								92,413 **)		

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
2. NRR : Nilai rata-rata
3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 30 Juni 2025
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,
WIRANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700904 199803 1 009

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4,00	3,83	3,67	3,67	3,67	4,00	3,67	3,67	3,50
2	4,00	3,20	3,40	3,20	3,40	4,00	3,20	3,20	3,20
3	3,50	3,50	4,00	4,00	3,50	4,00	4,00	3,50	3,50
4	4,00	3,40	3,50	3,70	3,50	4,00	3,40	3,20	3,57
5	3,67	3,33	3,33	3,33	3,33	4,00	3,33	3,20	3,20
6	4,00	4,00	3,33	3,33	3,33	4,00	3,67	3,33	3,33
7	4,00	3,25	3,25	3,50	3,70	4,00	3,80	3,70	3,50
8	4,00	3,67	3,67	3,67	3,33	4,00	3,67	3,67	3,67
9	4,00	3,40	3,60	3,80	3,60	4,00	3,60	3,40	3,40
10	4,00	3,40	3,70	3,40	3,70	4,00	3,60	3,40	3,20
11	4,00	3,67	3,67	3,67	4,00	4,00	3,33	3,33	4,00
12	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	4,00	3,75	3,75	3,75
14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
15	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	3,50	3,50	4,00
16	4,00	3,33	3,33	3,60	3,20	4,00	3,33	3,33	3,33
Jumlah Nilai Per Unsur	62,67	57,23	57,70	58,12	57,52	64,00	57,85	56,18	57,15
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisioner yang terisi	3,917	3,577	3,606	3,632	3,595	4,000	3,616	3,511	3,572
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,435	0,397	0,401	0,404	0,399	0,444	0,402	0,390	0,40
IKM Unit Pelayanan	91,739								

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
2. NRR : Nilai rata-rata
3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 31 Juli 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI
WIYANTO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700904 199803 1 009

AGUSTUS 2024

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4,00	3,70	3,50	3,70	3,50	4,00	4,00	3,60	3,70	
2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,70	4,00	4,00	
3	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	4,00	3,67	3,67	3,67	
4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
5	3,67	3,67	3,33	3,33	3,67	4,00	3,67	3,67	3,33	
6	4,00	3,50	3,50	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	3,50	
7	4,00	3,33	3,33	3,33	3,50	4,00	3,33	3,60	3,67	
8	3,73	3,67	3,67	3,33	3,67	4,00	3,67	3,50	3,67	
9	3,68	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	3,50	3,33	3,33	
10	3,50	4,00	4,00	3,50	3,33	4,00	3,67	3,67	3,33	
11	4,00	3,33	3,67	3,33	3,67	4,00	3,33	3,50	4,00	
12	3,50	3,50	3,50	3,33	3,33	4,00	3,50	3,50	3,67	
13	4,00	3,67	3,67	3,67	3,67	4,00	3,67	3,67	3,67	
14	3,67	3,33	3,67	3,33	3,33	4,00	3,67	3,67	3,33	
15	4,00	3,67	3,33	3,67	3,50	4,00	3,33	3,67	3,50	
16	4,00	3,33	3,33	3,33	3,33	4,00	3,50	3,33	3,67	
Jumlah Nilai Per Unsur	61,41	57,88	57,67	57,03	57,16	64,00	58,20	58,36	58,04	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,838	3,617	3,604	3,564	3,573	4,000	3,638	3,648	3,628	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,426	0,402	0,400	0,396	0,397	0,444	0,404	0,405	0,40	3,679 *)
IKM Unit Pelayanan										91,972 **)

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
2. NRR : Nilai rata-rata
3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 29 Agustus 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI



WIYANTO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 09700004 199803 1 009

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	4,00	4,00	3,60	3,70
2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	4,00	3,67	3,67	3,67	3,67	4,00	3,67	3,67	3,67	3,67
4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	3,67	3,33	3,33	3,33	3,67	4,00	3,67	3,33	3,33	3,33
6	4,00	3,50	3,50	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50
7	4,00	3,33	3,33	3,33	3,33	4,00	3,33	3,33	3,33	3,67
8	4,00	3,67	3,67	3,33	3,67	4,00	3,30	3,50	3,67	3,67
9	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	3,50	3,33	3,33	3,33
10	4,00	4,00	4,00	4,00	3,33	4,00	3,67	3,67	3,33	3,33
11	4,00	3,33	3,67	3,33	3,67	4,00	3,33	3,33	4,00	4,00
12	3,50	3,50	3,50	3,33	3,33	4,00	3,50	3,50	3,67	3,67
13	4,00	3,67	3,67	3,67	3,67	4,00	3,67	3,67	3,67	3,67
14	3,67	3,33	3,67	3,33	3,33	4,00	3,67	3,67	3,33	3,33
15	4,00	3,67	3,33	3,33	3,50	4,00	3,33	3,67	3,50	3,50
16	4,00	3,33	3,33	3,33	3,33	4,00	3,33	3,33	3,33	3,67
Jumlah Nilai Per Unsur	62,83	57,14	57,47	56,79	56,80	64,00	57,96	57,59	58,04	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisioner yang terisi	3,927	3,571	3,592	3,549	3,550	4,000	3,623	3,600	3,628	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,436	0,397	0,399	0,394	0,394	0,444	0,403	0,400	0,40	3,671 *)
IKM Unit Pelayanan										91,775 **)

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
2. NRR : Nilai rata-rata
3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 30 September 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI
WIYANTO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700904 199803 1 009

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda 1 Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3,60	3,44	3,52	3,60	3,52	4,00	3,52	3,52	3,52	
2	3,76	3,60	3,60	3,84	3,92	4,00	3,76	3,60	3,68	
3	3,68	3,60	3,68	4,00	3,84	4,00	3,60	3,76	3,68	
4	3,92	3,36	3,60	3,68	3,76	4,00	3,60	3,36	3,68	
5	3,86	3,36	3,68	3,84	3,68	4,00	3,52	3,36	3,52	
6	3,68	3,68	3,52	3,76	3,92	4,00	3,68	3,52	3,82	
7	3,60	3,68	3,36	3,84	3,60	4,00	3,60	3,52	3,52	
8	3,76	3,68	3,76	3,84	3,84	4,00	3,52	3,60	3,66	
9	3,84	3,60	3,60	3,76	3,76	4,00	3,60	3,52	3,52	
10	3,77	3,43	3,66	3,89	3,77	4,00	3,66	3,43	3,76	
11	3,60	3,52	3,76	3,92	3,68	4,00	3,60	3,52	3,52	
12	3,56	3,64	3,73	4,00	3,73	4,00	3,82	3,56	3,73	
13	3,84	3,68	3,68	3,84	3,68	4,00	3,76	3,60	3,52	
14	3,76	3,60	3,68	3,68	3,68	4,00	3,52	3,73	3,68	
15	3,80	3,70	3,50	3,70	3,60	4,00	3,60	3,70	3,80	
16	3,40	3,50	3,76	3,50	3,60	4,00	3,60	3,60	3,50	
Jumlah Nilai Per Unsur	59,43	57,07	58,09	60,69	59,58	64,00	57,96	56,89	58,11	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,714	3,567	3,631	3,793	3,724	4,000	3,622	3,556	3,632	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,413	0,396	0,403	0,421	0,414	0,444	0,402	0,395	0,40	3,693 *)
IKM Unit Pelayanan										92,331 **)

NOVEMBER 2024

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	4,00	3,60	3,60	3,60	
2	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	4,00	3,60	3,20	3,60	
3	3,60	3,20	3,20	3,20	3,20	4,00	3,20	2,80	3,20	
4	3,87	3,47	3,47	3,60	3,60	4,00	3,80	3,60	3,60	
5	4,00	4,00	3,60	4,00	4,00	4,00	3,60	3,60	3,60	
6	3,73	3,47	3,73	3,73	3,73	4,00	3,73	3,73	3,73	
7	4,00	3,20	3,60	3,60	4,00	4,00	3,60	3,60	3,60	
8	3,20	3,20	4,00	3,20	3,20	4,00	3,20	4,00	3,20	
9	3,20	3,60	3,40	3,60	3,60	4,00	3,60	8,60	3,40	
10	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
11	3,80	3,60	3,60	3,60	3,80	4,00	3,60	3,80	3,60	
12	3,60	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00	3,70	3,80	3,80	
13	3,50	3,60	3,50	3,70	3,70	4,00	3,60	3,70	3,60	
14	3,60	3,68	3,84	3,76	3,84	4,00	3,76	3,84	3,60	
15	3,20	3,20	3,60	3,60	3,60	4,00	3,60	3,20	3,20	
16	3,52	3,68	3,36	3,52	3,36	4,00	3,36	3,20	3,20	
Jumlah Nilai Per Unsur	58,02	56,59	57,90	58,01	58,63	64,00	57,35	62,27	56,53	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,626	3,537	3,619	3,626	3,665	4,000	3,585	3,892	3,533	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,403	0,393	0,402	0,403	0,407	0,444	0,398	0,432	0,39	3,676
IKM Unit Pelayanan										91,896

Keterangan :

1. U1 s/d U12	: Unsur pelayanan
2. NRR	: Nilai rata-rata
3. IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *)	: Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **)	: $IKM \text{ unit pelayanan} \times 25$

Wonogiri, 28 November 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri

WIYANTO, SH., M.Si.
IP. 19700904 199803 1 009

DESEMBER 2024

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
 ALAMAT : Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri
 TELP./FAKS. : (0273) 321029

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3,92	3,60	3,60	3,68	3,60	4,00	3,44	3,60	3,60	
2	3,60	3,47	3,87	3,87	3,87	4,00	3,73	3,60	3,47	
3	3,68	3,52	3,52	3,60	3,68	4,00	3,44	3,68	3,52	
4	3,68	3,60	3,76	3,84	3,76	4,00	3,84	3,68	3,84	
5	3,76	3,44	3,60	3,76	3,84	4,00	3,44	3,44	3,60	
6	3,52	3,60	3,52	4,00	3,60	4,00	3,52	3,44	3,44	
7	3,68	3,60	3,60	3,52	3,52	4,00	3,68	3,44	3,60	
8	3,44	3,73	3,52	3,60	3,44	4,00	3,28	3,60	3,52	
9	3,52	3,36	3,44	3,76	3,44	4,00	3,68	3,84	3,52	
10	4,00	3,68	3,84	3,92	3,76	4,00	3,84	3,68	3,76	
11	3,84	3,68	3,76	3,68	3,68	4,00	3,60	3,68	3,52	
12	3,68	3,60	3,60	3,84	3,92	4,00	3,76	3,92	3,76	
13	3,60	3,60	3,36	3,68	3,52	4,00	3,52	3,44	3,36	
14	3,84	3,60	3,68	3,76	3,76	4,00	3,68	3,68	3,84	
15	3,76	3,68	3,60	3,84	3,76	4,00	3,60	3,60	3,68	
16	3,84	3,60	3,68	3,76	3,76	4,00	3,68	3,68	3,84	
Jumlah Nilai Per Unsur	59,36	57,36	57,95	60,11	58,91	64,00	57,73	58,00	57,87	
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuisisioner yang terisi	3,710	3,585	3,622	3,757	3,682	4,000	3,608	3,625	3,617	
NRR Tertimbang Per Unsur = NRR per unsur x 0,083	0,412	0,398	0,402	0,417	0,409	0,444	0,401	0,403	0,40	3,689 *)
IKM Unit Pelayanan										92,236 **)

Keterangan : 1. U1 s/d U12 : Unsur pelayanan
 2. NRR : Nilai rata-rata
 3. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
 4. *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
 5. **) : IKM unit pelayanan x 25

Wonogiri, 31 Desember 2025



TUJUAN II: Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator: Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Penjelasan:

Untuk mengetahui Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), maka harus dihitung terlebih dahulu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2025. Berdasarkan data yang ada di dalam Berita Resmi Statistik No. 31/12/3312/Th. XI, 5 Desember 2025 Keadaan Ketenagakerjaan Wonogiri Agustus 2024, bahwa TPT Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 sebesar 2,16% yang diperoleh dari komponen data per Agustus 2024:

Diketahui:

Penduduk Usia Kerja : 871.154 orang

Angkatan Kerja : 685.334 orang

Untuk menghitung TKK dengan rumus:

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% = \frac{670.532}{685.334} \times 100\% = 97,84\%$$

Angka TKK ini menjelaskan besarnya persentase angkatan kerja yang terserap di dunia kerja. Semakin tinggi TKK, maka kesempatan kerja semakin tinggi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah berupaya untuk semakin meningkatkan angka TKK dengan pelayanan-pelayanan yang telah diterapkan seperti penyediaan lowongan kerja, *Career Class* bagi pencari kerja yang masih membutuhkan pendampingan dalam mempersiapkan diri mereka sebelum terjun ke dunia kerja dan bimbingan konseling bagi pencari kerja agar dapat memilih pekerjaan dengan baik, serta Pelatihan *Skill Grab* yang diselenggarakan di UPTD BLK.

Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Diketahui:

Pengangguran Terbuka : 14.802 orang

Angkatan Kerja : 685.334 orang

Untuk menghitung TPT dengan rumus:

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% = \frac{14.802}{685.334} \times 100\% = 2,159\% \sim 2,16\%$$

Penjelasan:

Semakin tinggi angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan semakin rendah.

SASARAN II: Menurunnya Pengangguran

Indikator:

6. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

Data untuk jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja yang terdaftar disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar menurut Data Triwulanan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

TAHUN 2025						
Data	Satuan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	1.323	2.719	2.029	1.268	7.339
Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	1.672	3.281	2.706	1.896	9.555

Sumber: Data Monev PK Triwulanan Tahun 2025

Maka, besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\% = \frac{7.339}{9.555} \times 100\% = 76,80\%$$

Dengan hal ini, angka besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 76,80% telah memenuhi target yang telah ditentukan selama 1 tahun yakni sebesar 58,03% atau jika dipersentasekan sebesar 132,35%. Pencapaian ini dikarenakan upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang telah mendorong dan memberikan pelayanan melalui inovasi-inovasi bagi para pencari kerja.

7. Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

Data untuk jumlah calon tenaga kerja yang kompeten dan jumlah pencari kerja yang terdaftar disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Jumlah Calon Tenaga Kerja yang kompeten dan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar menurut Data Triwulanan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri

TAHUN 2025						
Data	Satuan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten (APBD + DBHCHT)	orang	551	796	838	330	2.515
Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	1.672	3.281	2.706	1.896	9.555

Sumber: Data Monev PK Triwulanan Tahun 2025

Maka, besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\% = \frac{2.515}{9.555} \times 100\% = 26,32\%$$

Dengan hal ini, angka besaran calon tenaga kerja yang kompeten sebesar 26,32% telah memenuhi target yang telah ditentukan selama 1 tahun yakni sebesar 17,19% atau jika dipersentasekan sebesar 153,11%. Pencapaian ini dikarenakan upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang telah mendorong dan memberikan pelayanan melalui pelatihan-pelatihan melalui UPTD BLK, Kerjasama dengan LPK Swasta maupun Program Pelatihan dari Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja bagi para pencari kerja.

8. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun

$$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$$

Data untuk jumlah sengketa pengusaha pekerja dan jumlah perusahaan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja dan Jumlah Perusahaan
menurut Data Triwulanan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri

TAHUN 2025						
Data	Satuan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Sengketa	-	-	-	3	3
Jumlah perusahaan	Perusahaan	477	477	477	477	477

Sumber: Data Monev PK Triwulanan Tahun 2025

Jumlah perusahaan sampai akhir tahun 2025 setelah melewati pergerakan yang fluktuatif (karena perusahaan *merger*, tutup dan prioritas yang dihitung adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 10 pegawai) didapat sebanyak 477 perusahaan. Maka, angka sengketa pengusaha pekerja per tahun sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\% = \frac{3}{477} \times 100\% = 0,62\%$$

Dengan hal ini, angka sengketa pengusaha pekerja per tahun sebesar 0,62% telah memenuhi target yang telah ditentukan selama 1 tahun yakni sebesar 1,73% atau jika dipersentasekan sebesar 167,19%. Jika angka sengketa semakin kecil dari target yang ditentukan, maka pencapaian ini semakin baik dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{(1,73\% - (0,62\% - 1,73\%))}{1,73\%} \times 100\% = 164,16\%$$

Angka sengketa ini semakin kecil dikarenakan upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan para pekerjanya, sehingga sengketa yang ada tidak sampai ke meja pengadilan.

TUJUAN III: Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro

Indikator: Rasio Penduduk yang Berwirausaha

Penjelasan:

Penduduk yang berwirausaha di Kabupaten Wonogiri memiliki potensi untuk terus meningkat dengan berbagai upaya yang dilakukan. Dengan dukungan

pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, diharapkan kegiatan wirausaha di Wonogiri dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Di tahun 2025, rasio penduduk yang berwirausaha menunjukkan angka sebesar 4,56% dimana target yang ditentukan sebesar 4,05% pertumbuhan yang diharapkan. Tentu, hal ini harus diperhatikan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses permodalan yakni pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausahawan.
3. Pengembangan infrastruktur yakni pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung pengembangan usaha.
4. Pembentukan jaringan kerja yakni pembentukan jaringan kerja antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait dapat memperkuat ekosistem wirausaha.

SASARAN III: Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro

Indikator: Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

Penjelasan:

PPBT merupakan istilah yang merujuk pada individu atau kelompok yang baru memulai bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai dasar dari produk atau layanan yang ditawarkan. Di Kabupaten Wonogiri, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan semangat kewirausahaan yang tinggi, PPBT memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi oleh PPBT di Kabupaten Wonogiri, antara lain:

- a. Akses permodalan yakni sama seperti UMKM pada umumnya, PPBT di Wonogiri seringkali kesulitan mendapatkan akses permodalan yang cukup.
- b. Keterbatasan infrastruktur yakni keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang stabil dan aksesibilitas terhadap teknologi informasi, menjadi kendala bagi pengembangan PPBT.
- c. Keterampilan teknis yakni tidak semua pelaku usaha memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengembangkan produk atau layanan berbasis teknologi.
- d. Pemasaran yakni pemasaran produk atau layanan berbasis teknologi membutuhkan strategi yang tepat dan efektif untuk menjangkau target pasar.

Sedangkan dari dukungan pemerintah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah berupaya mendukung pertumbuhan PPBT melalui berbagai program, seperti pelatihan dan pembinaan, pemerintah menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi calon dan pelaku usaha PPBT untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- b. Fasilitasi akses permodalan yakni pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi PPBT.
- c. Inkubator bisnis yakni pembentukan inkubator bisnis dapat membantu PPBT dalam mengembangkan ide bisnisnya menjadi usaha yang sukses.
- d. Konektivitas yakni peningkatan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, diharapkan dapat mempermudah pengembangan usaha berbasis teknologi.

Di tahun 2025, jumlah PPBT yang ditargetkan sebanyak 350 PPBT dan hingga akhir tahun 2025 jumlah PPBT yang tumbuh di Kabupaten Wonogiri sebanyak 352 pengusaha.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	202n-2 (2023)			202n-1 (2024)			2025		
				Renstra 2021-2026								
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	Index	45	40	88,89	45	37	82,22	46	37	80,43
1.1	SASARAN I: Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Index	75,50	71,96	95,31	76,50	78,05	102,03	77,50	78,30	101,03
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	70	71,25	101,79	75	80,15	106,87	81	80,67	99,59
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	Orang	2	4	200	3	4	133,33	4	4	100
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	1	2	200	1	2	200	1	2	200
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	91	91,52	100,57	91	91,94	101,03	91	92,15	101,26
2.	TUJUAN II: Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,15	98,07	102,00	96,40	97,60	101,24	96,70	97,84	101,18
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,85	1,92	150,13	3,60	2,40	133,33	3,30	2,16	134,54
2.1	SASARAN II: Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	56,36	72,01	127,77	57,20	78,72	137,62	58,03	76,80	132,35
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	13,37	84,46	631,71	15,28	32,02	209,55	17,19	26,32	153,11
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	2,05	0,61	170,24	1,89	0,62	167,19	1,73	0,62	164,16
3.	TUJUAN III: Meningkatkan pertumbuhan pelaku	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	3,85	3,96	102,86	3,95	3,96	100,25	4,05	4,56	112,59

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	202n-2 (2023)			202n-1 (2024)			2025		
				Renstra 2021-2026								
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	usaha makro dan mikro											
3.1	SASARAN III: Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Peng usaha	250	320	128	300	319	106,33	350	352	100,57

Sumber: Capaian Kinerja di e-SAKIP Tahun 2023-2024-2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel di atas menjelaskan Capaian Kinerja Tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Tujuan dan Sasaran saat tahun 2022 hingga 2024 memiliki jumlah indikator yang berbeda dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.14
Jumlah Indikator Tujuan dan Sasaran saat Tahun 2022 s.d 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Tujuan / Sasaran	2022 - 2023	2025
	Jumlah Indikator	
Tujuan I	1	1
Sasaran I	5	5
Tujuan II	1	2
Sasaran II	3	3
Tujuan III	-	1
Sasaran III	-	1

Sumber: Perubahan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2021-2026

- Pada Tujuan I tahun 2025: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” memiliki indikator Nilai Kematangan Organisasi dengan target sebesar 46 dan tercapai sebesar 37 (80,43%).

Tahun 2021 : 42 dari target 44 (95,45%)

Tahun 2022 : 40 dari target 44 (90,90%)

Tahun 2023 : 40 dari target 45 (88,88%)

Tahun 2024 : 37 dari target 45 (82,22%)

Tahun 2025 : 37 dari target 46 (80,43%)

Di tahun 2025 Nilai Kematangan Organisasi memiliki target 46, dengan capaian 37 dan ini menunjukkan bahwa belum memenuhi target. Pada saat penilaian Kematangan Organisasi, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah memenuhi data-data dukung yang diperlukan yang kemudian diajukan ke Bagian Organisasi untuk diverifikasi, namun dari data dukung tersebut dinilai oleh Bagian Organisasi ke dalam kriteria nilai yang rendah, dimana sebenarnya dapat masuk ke dalam kriteria nilai yang tinggi.

- Pada Sasaran I tahun 2025: “Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri” memiliki indikator:

a. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2024 belum dirilis oleh Inspektorat dan nilai yang dilampirkan dalam dokumen LKjIP ini merupakan nilai SAKIP tahun 2023 yakni sebesar 78,05 dengan data dukung berupa LHE (Lembar Hasil Evaluasi) SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Untuk nilai SAKIP tersaji sebagai berikut:

Tahun 2021 : 78,14 / Kategori BB (Sangat Baik)

Tahun 2022 : 71,96 / Kategori BB (Sangat Baik)

Tahun 2023 : 78,05 / Kategori BB (Sangat Baik)

Tahun 2023 : 78,30 / Kategori BB (Sangat Baik)

Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 mengalami peningkatan karena Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian karena sebagian besar target kinerja telah tercapai dan dapat memenuhi rekomendasi atas penilaian SAKIP tahun berjalan.

b. Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Di tahun 2025 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki target sebesar 81 dan setelah melalui perhitungan sampai akhir tahun menghasilkan capaian sebesar 80,67 yang berarti bahwa sebagian besar pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah berkontribusi dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dan untuk ke depan agar dipertahankan dan ditingkatkan nilai capaian ini. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN ini berdasarkan komponen:

1) Pendidikan

2) Kompetensi

3) Kinerja

4) Disiplin

Indeks Profesionalitas ASN dari tahun 2021 hingga tahun 2025 sebagai berikut:

Tahun 2021 : 67,23

Tahun 2022 : 67,33

Tahun 2023 : 71,25

Tahun 2024 : 80,15

Tahun 2025 : 80,67

Nilai IP ASN ini dapat diperoleh dari aplikasi myASN.

- c. Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan

Di tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri menetapkan SK Agen Perubahan, yang mana target untuk jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 orang, namun di tahun 2025, SK tersebut diperbarui karena terdapat penambahan jumlah Agen Perubahan menjadi sebanyak 4 orang, yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tahun 2021 : 1 Orang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri)

Tahun 2022 : 3 Orang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kepala UPTD BLK Kabupaten Wonogiri)

Tahun 2023 : 4 Orang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kepala UPTD BLK Kabupaten Wonogiri dan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

Tahun 2024 : 4 Orang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala UPTD BLK Kabupaten Wonogiri dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda)

Peran Agen Perubahan ini memberikan dorongan kepada seluruh pegawai untuk ikut berpartisipasi mengembangkan instansi ke arah yang lebih baik.

- d. Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah menerapkan 2 inovasi yang dikembangkan untuk mencapai efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan dan pencapaian target, yakni Super Gen Z dan *Work Readiness Program* (WRP) dan telah terdaftar di Wonogiri Innovation Award (WIA) atau daftar inovasi daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Wonogiri, dengan penjelasan sebagai berikut:

Inovasi Super Gen-Z:

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Program *Upgrading Softskill* untuk Generasi Z (Super Gen-Z) Kabupaten Wonogiri tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Inovasi WRP (*Work Readiness Programme*):

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Nomor 649 Tahun 2022 tentang Daftar Peserta Pelatihan Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT) melalui Pelatihan *Work Readiness Programme* (WRP) Tahun 2022.

Tahun 2021	: Jendela Kerja Super Gen-Z
Tahun 2022	: Jendela Kerja Super Gen-Z WRP (<i>Work Readiness Programme</i>)
Tahun 2023	: Super Gen-Z WRP (<i>Work Readiness Programme</i>)
Tahun 2024	: Super Gen-Z WRP (<i>Work Readiness Programme</i>)
Tahun 2024	: Super Gen-Z WRP (<i>Work Readiness Programme</i>)

Untuk tahun 2025, masih dengan 2 inovasi yang dijalankan dan dikembangkan.

e. IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Sejak tahun 2021, penilaian IKM terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah dilakukan terhadap beberapa komponen penilaian dan memperoleh nilai 90,03 dari target 90. Sedangkan di tahun 2022 menghasilkan nilai sebesar 90,26 dari target 90, di tahun 2023 menghasilkan nilai sebesar 91,52 dari target 91, di tahun 2024 menghasilkan nilai sebesar 91,94 dari target 91 dan di tahun 2025 menghasilkan nilai sebesar 92,15 dari target 91. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat dalam kaitannya dengan urusan ketenagakerjaan telah mengalami peningkatan semakin baik.

Tahun 2021	: 90,03 dari target 90 (100,03%)
Tahun 2022	: 90,26 dari target 90 (100,28%)
Tahun 2023	: 91,52 dari target 91 (100,57%)
Tahun 2024	: 91,94 dari target 91 (101,03%)
Tahun 2025	: 92,15 dari target 91 (101,26%)

- Pada Tujuan II tahun 2025: “Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja” memiliki indikator:

a. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di tahun 2025 dengan target sebesar 96,70% dan tercapai sebesar 97,84% (101,18%).

$$\text{Rumus untuk menghitung TKK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Tahun 2021	: 97,57% dari target 95,73% (101,92%)
Tahun 2022	: 98,05% dari target 95,90% (102,24%)
Tahun 2023	: 98,07% dari target 96,15% (101,99%)
Tahun 2024	: 97,60% dari target 96,40% (101,24%)
Tahun 2025	: 97,84% dari target 96,70% (101,18%)

Maka, di tahun 2025 pencapaian TKK dinilai sangat baik.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonogiri tahun 2025 sebesar 2,16%. Hal ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini masih tergolong baik karena menduduki peringkat ke 2 se-Jawa Tengah, namun tetap harus dievaluasi agar kembali menurun. Jika angka TPT semakin kecil, maka tingkat pengangguran semakin rendah.

$$\text{Rumus untuk menghitung TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

TPT 2020	: 4,27%
TPT 2021	: 2,43%
TPT 2022	: 1,95%
TPT 2023	: 1,92%
TPT 2024	: 2,40%
TPT 2025	: 2,16%

- Pada Sasaran II Tahun 2025: “Menurunnya Pengangguran” memiliki indikator:

- a. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan:

Dalam Sasaran II tahun 2025, dengan indikator “Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan” menghasilkan capaian sebagai berikut:

Tahun 2021	: 62,42% dari target 40% (156,05%)
Tahun 2022	: 67,88% dari target 55,16% (123,06%)
Tahun 2023	: 72,01% dari target 56,36% (127,76%)
Tahun 2024	: 78,72% dari target 57,20% (137,62%)
Tahun 2025	: 76,80% dari target 58,03% (132,35%)

Hal ini menggambarkan bahwa telah banyak pencari kerja di Kabupaten Wonogiri yang telah terdaftar di database Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan status mereka juga telah terdaftar bekerja di suatu instansi/perusahaan.

- b. Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja:

Dalam Sasaran II tahun 2025, dengan indikator “Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja” menghasilkan capaian sebagai berikut:

Tahun 2021	: 5,05% dari target n/a
Tahun 2022	: 26,38% dari target 11,46% (230,19%)
Tahun 2023	: 84,46% dari target 13,37% (631,71%)
Tahun 2024	: 32,02% dari target 15,28% (209,55%)
Tahun 2025	: 26,32% dari target 17,19% (209,55%)

Di tahun 2021 besaran kompetensi calon tenaga kerja menghasilkan 5,05% karena pada saat itu kondisi pandemi Covid-19 yang mana terdapat pembatasan kegiatan dalam skala besar, termasuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Dan mulai tahun 2022 keadaan mulai membaik di segala sektor, kegiatan pelatihan dapat kembali diselenggarakan sehingga capaian di tahun 2022 melonjak ke angka 26,38% dari yang ditargetkan sebesar 11,46%. Dan di tahun 2023, terdapat capaian sebesar 84,46% dari target sebesar 13,37%. Lonjakan angka besaran kompetensi calon tenaga kerja ini disebabkan karena semakin banyaknya calon tenaga kerja yang mengikuti program pelatihan-pelatihan di LPK Swasta maupun di UPTD BLK Kabupaten Wonogiri. Di tahun 2024, terdapat capaian sebesar 32,02% dari target sebesar 15,28%. Di tahun 2024, terdapat capaian sebesar 26,32% dari target sebesar 17,19%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat/pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan dinyatakan kompeten.

c. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja:

Dalam Sasaran II tahun 2025, dengan indikator “Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun” menghasilkan capaian sebagai berikut:

Tahun 2021	: n/a
Tahun 2022	: 0,60% dari target 2,21% (172,85%)
Tahun 2023	: 0,61% dari target 2,05% (170,24%)
Tahun 2024	: 0,62% dari target 1,89% (167,19%)
Tahun 2025	: 0,62% dari target 1,73% (164,16%)

Perkembangan angka sengketa pengusaha pekerja per tahun ini jika dilihat dari tahun 2022 hingga 2025 mengalami peningkatan, namun tidak signifikan, yang berarti jika terjadi sengketa masih dapat diselesaikan antara pengusaha dengan pekerja melalui mediasi.

- Pada Tujuan III Tahun 2025: “Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro” memiliki indikator Rasio Penduduk yang Berwirausaha, menghasilkan capaian sebagai berikut:

Tahun 2021	: 3,87% dari target 3,65% (106,03%)
Tahun 2022	: 3,90% dari target 3,75% (104,00%)
Tahun 2023	: 3,96% dari target 3,85% (102,86%)
Tahun 2024	: 3,96% dari target 3,95% (100,25%)
Tahun 2025	: 4,56% dari target 4,05% (112,59%)

Angka rasio penduduk yang berwirausaha ini menunjukkan bahwa penduduk yang berwirausaha di Wonogiri memiliki potensi untuk terus meningkat dengan berbagai upaya yang dilakukan. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, diharapkan kegiatan wirausaha di Wonogiri dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

- Pada Sasaran III Tahun 2024: “Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro” memiliki indikator Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Elektronik (PPBT), menghasilkan capaian sebagai berikut:

Tahun 2021	: 153 PPBT dari target 125 PPBT (122,40%)
Tahun 2022	: 210 PPBT dari target 200 PPBT (105,00%)
Tahun 2023	: 320 PPBT dari target 250 PPBT (128,00%)
Tahun 2024	: 319 PPBT dari target 300 PPBT (106,33%)
Tahun 2025	: 352 PPBT dari target 350 PPBT (100,57%)

Keberadaan Pengusaha Pemula Berbasis Elektronik (PPBT) di Kabupaten Wonogiri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, diharapkan semakin banyak PPBT yang muncul dan berkembang di Wonogiri. Dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan kenaikan secara perlahan dan signifikan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, maka akan dapat melihat sejauh mana target yang telah dicapai tahun ini dengan target akhir RENSTRA yang telah ditetapkan. Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA:

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir
RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1.	TUJUAN I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	Index	37	46	80,43	Akan Tercapai
1.1	SASARAN I: Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Index	78,30	78,50	99,74	Sangat Baik
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	80,67	81,50	98,98	Sangat Baik
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	Orang	4	5	80	Akan Tercapai

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	2	1	200	Sudah Melebihi Target RPJMD
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	92,15	91	101,26	Sudah Melebihi Target RPJMD
2.	TUJUAN II: Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,84	97,00	100,86	Sudah Melebihi Target RPJMD
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,16	3,00	128	Sudah Melebihi Target RPJMD
2.1	SASARAN II: Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	76,80	61,19	125,51	Sudah Melebihi Target RPJMD
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	26,32	19,10	137,80	Sudah Melebihi Target RPJMD
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	0,62	1,57	160,50	Sudah Melebihi Target RPJMD
3.	TUJUAN III: Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	4,56	4,15	109,87	Sudah Melebihi Target RPJMD
3.1	SASARAN III: Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Pengusaha	352	400	88	Akan Tercapai

Sumber: Monev PK 2025 dan Perubahan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2021-2026

Pada tabel diatas menyajikan tentang perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Perbandingan tersebut untuk mengukur sejauh mana capaian tahun berjalan dengan target akhir RENSTRA. Selain itu juga untuk mempersiapkan,

mengantisipasi dan menyusun strategi jika target tersebut belum tercapai. Berikut adalah deskripsi perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri:

1. Pada Tujuan I “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan indikator Nilai Kematangan Organisasi, memiliki capaian sebesar 80,43% atau dengan tingkat kemajuan “akan tercapai” dari target akhir RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.
2. Pada Sasaran I “Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri” dengan 5 indikator yaitu sebagai berikut:
 - a. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2025 memiliki capaian sebesar 99,74% dengan tingkat kemajuan “Sangat Baik” dari target akhir RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan capaian sebesar 98,98% dan dengan tingkat kemajuan “Sangat Baik” dari target akhir RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.
 - c. Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan dengan capaian sebesar 80% dan target akhir RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebanyak 5 Agen Perubahan dengan tingkat kemajuan “Akan Tercapai”.
 - d. Indeks inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dengan capaian sebesar 200% karena target pada akhir RENSTRA sebanyak 1 inovasi namun hingga tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah memiliki dan menjalankan 2 inovasi. Dengan demikian mencapai tingkat kemajuan “Sudah Melebihi Target RPJMD”.
 - e. IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dengan capaian sebesar 101,26% dan dengan tingkat kemajuan “Sudah Melebihi Target RPJMD”.
3. Pada Tujuan II “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja” dengan 2 indikator yakni:
 - a. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) memiliki capaian sebesar 100,86% dari target akhir RENSTRA sebesar 97%, dengan demikian tingkat kemajuannya “Sudah Melebihi Target RPJMD”.
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki capaian sebesar 128% dan target akhir RENSTRA sebesar 3,00%, dengan demikian tingkat kemajuannya “Sudah Melebihi Target RPJMD”.

4. Pada Sasaran II “Menurunnya Pengangguran” dengan 3 indikator sebagai berikut:
 - a. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan dengan capaian sebesar 125,51% dan dengan tingkat kemajuan “Sudah Melebihi Target RPJMD”.
 - b. Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja dengan capaian sebesar 137,80% dan dengan tingkat kemajuan “Sudah Melebihi Target RPJMD”.
 - c. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun; dengan capaian sebesar 160,50% dan dengan tingkat kemajuan “Sudah Melebihi Target RPJMD”.
5. Pada Tujuan III “Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro” dengan indikator Rasio Penduduk yang Berwirausaha dengan capaian sebesar 109,87% dan dengan tingkat kemajuan “Sudah Melebihi Target RPJMD”.
6. Pada Sasaran III “Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro” dengan indikator Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), memiliki capaian sebesar 88% dan dengan tingkat kemajuan “Akan Tercapai”

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah

Dalam melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, maka perlu juga untuk dibandingkan dengan standar Provinsi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana perkembangan capaian kinerja daerah dengan standar Provinsi. Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja dengan standar Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini (2025)
dengan Standar DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Standar Prov. Jateng	% Capaian
1.	TUJUAN I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	Index	37	n/a	n/a
1.1	SASARAN I: Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Index	78,30	n/a	n/a
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	80,67	n/a	n/a
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	Orang	4	n/a	n/a

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Standar Prov. Jateng	% Capaian
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	2	n/a	n/a
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	92,15	85,20	108,15
2.	TUJUAN II: Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,84	n/a	n/a
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,16	n/a	n/a
2.1	SASARAN II: Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	76,80	71,06	108,07
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	26,32	n/a	n/a
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	0,62	n/a	n/a
3.	TUJUAN III: Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	4,56	n/a	n/a
3.1	SASARAN III: Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Pengusaha	352	n/a	n/a

*Sumber: RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2021-2026
RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 2024-2026*

Tabel di atas menyajikan tentang perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan dibuat sebagai gambaran kondisi di Kabupaten dengan standari di Provinsi. Berikut deskripsi dari tabel perbandingan tersebut:

1. Pada Tujuan I “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dengan indikator Nilai Kematangan Organisasi memiliki capaian sebesar 37 dari target sebesar 46, sedangkan pada dokumen RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, belum menetapkan target dan indikator.
2. Pada Sasaran I “Meningkatnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri” dengan 5 indikator yaitu sebagai berikut:
 - a. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, capaian untuk tahun 2025 sebesar 78,30 (dalam LHE SAKIP 2024). Sedangkan untuk target nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RENSTRA 2024-2026 belum menargetkan.

- b. Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri; memiliki capaian sebesar 80,67% sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RENSTRA 2024-2026 belum menargetkan dan menetapkan indikator dan target untuk Indeks Profesionalitas ASN.
 - c. Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan di tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 4 orang dari target sebanyak 4 orang sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RENSTRA 2024-2026 belum menargetkan dan menetapkan indikator dan target untuk Jumlah ASN yang menjadi Agen Perubahan.
 - d. Indeks inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dengan capaian sebanyak 2 inovasi dari target sebanyak 1 inovasi. Namun, untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RENSTRA 2024-2026 belum menargetkan dan menetapkan indikator dan target untuk Indeks Inovasi.
 - e. IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, dengan capaian sebesar 92,15 jika dibandingkan dengan target Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 85,20 dalam dokumen RENSTRA 2024-2026, maka persentase capaian provinsi sebesar 108,15%.
3. Pada Tujuan II “Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja” Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan angka capaian TKK sebesar 97,84% dan untuk TPT sebesar 2,16%, namun untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RENSTRA 2024-2026 belum menargetkan TKK dan TPT.
4. Pada Sasaran II “Menurunnya Pengangguran” dengan 3 indikator sebagai berikut:
- a. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan, dengan capaian sebesar 76,80% jika dibandingkan dengan target Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,06% maka menghasilkan realisasi capaian terhadap provinsi sebesar 108,07%.
 - b. Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja, dengan capaian sebesar 26,32% jika dibandingkan dengan target Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RENSTRA 2024-2026

belum menargetkan Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja.

- c. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun, memiliki capaian sebesar 0,62% sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan indikator dan target untuk Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun.
5. Pada Tujuan III “Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro” Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dengan indikator Rasio Penduduk yang Berwirausaha memiliki capaian sebesar 4,56%, namun untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tujuan dan indikator ini tidak muncul dalam RENSTRA 2024-2026.
6. Pada Sasaran III “Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro” Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dengan indikator Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) memiliki capaian sebesar 352, namun untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tujuan dan indikator ini tidak muncul dalam RENSTRA 2024-2026.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai target organisasi, maka perlu dilakukan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan beserta solusi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Berikut tabel analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja OPD:

Tabel 3.17
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	TUJUAN I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	Index	46	37	80,43	Analisis Keberhasilan: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah memenuhi sebagian besar indikator penilaian Kematangan Organisasi yang berjumlah sebanyak 11 indikator, namun pada tahun 2024 masih terdapat indikator yang belum terpenuhi data dukungnya.	Solusi yang dilakukan: Mensosialisasikan ke semua pegawai terkait penilaian Kematangan Organisasi agar dapat dipahami oleh semua pegawai dan komponen yang belum lengkap dapat segera dilengkapi.
1.1	SASARAN I: Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Index	77,50	78,30	101,03	Analisis Keberhasilan: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah memenuhi rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat terkait penilaian SAKIP yang tertuang dalam LHE (Lembar Hasil Evaluasi) SAKIP dari Inspektorat.	Solusi yang dilakukan: Mempertahankan dan meningkatkan perolehan nilai SAKIP dengan memenuhi rekomendasi pasca evaluasi seperti yang tertera pada LHE (Lembar Hasil Evaluasi) SAKIP.
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	81	80,67	99,59	Analisis Keberhasilan: Jika melihat hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri belum mencapai target yang ditentukan,	Solusi yang dilakukan: Mensosialisasikan kepada pegawai untuk ikut peran aktif dalam meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN dengan untuk mengikuti kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
							masih banyak pegawai yang belum mengikuti kegiatan pelatihan kompetensi sesuai dengan tupoksi masing-masing.	pelatihan bersertifikat kompetensi sesuai tupoksi masing-masing, agar komponen “Kompetensi” mendapat nilai maksimal
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan	Orang	4	4	100	Analisis Keberhasilan: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2021 telah membentuk Agen Perubahan dan telah menyusun SK Agen Perubahan. Di tahun 2024 telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas tentang Penunjukkan Agen Perubahan sejumlah 4 orang, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala UPTD BLK Kabupaten Wonogiri dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda yang memiliki peran untuk mendorong perubahan.	Solusi yang dilakukan: Menambah jumlah Agen Perubahan agar semakin membawa dampak positif dan menjadi contoh <i>role model</i> bagi seluruh pegawai untuk berpikir, bertindak laku dan berprestasi.
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	1	2	200	Analisis Keberhasilan: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2024 telah membentuk dan menjalankan 2 inovasi (Super Gen-Z dan WRP /	Solusi yang dilakukan: Mengembangkan lebih dalam lagi akan inovasi yang telah ada, agar inovasi ini benar-benar membantu dalam pencapaian target Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
							Work Readiness Programe) dan masing-masing-masing telah memiliki SK. Terbentuknya inovasi ini memberi dampak positif bagi kelangsungan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, sehingga pelayanan menjadi maksimal, masyarakat merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan.	
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	91	92,15	101,26	Analisis Keberhasilan: Angka capaian IKM yang tinggi ini berasal dari pelayanan terbaik yang diberikan kepada para pencari kerja dan atas sarana-prasarana yang memadai.	Solusi yang dilakukan: Mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dengan memberi pelayanan terbaik, baik dari sisi komunikasi maupun dari sisi sarana-prasarana.
2.	TUJUAN II: Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,70	97,84	101,18	Analisis Keberhasilan: Angka capaian TKK ini berasal dari TPT yang juga semakin kecil, karena rumus TKK = $(\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja} : \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$. Semakin besar TKK, maka semakin banyak orang yang mendapatkan pekerjaan.	Solusi yang dilakukan: Mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dengan terus memberi pelayanan terbaik dan mendorong pencari kerja untuk segera mendapatkan pekerjaan.
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,30	2,16	134,54	Analisis Keberhasilan: Rumus untuk menghitung TPT ini yakni $TPT = (\text{Jumlah}$	Solusi yang dilakukan: Mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dengan terus memberi pelayanan terbaik

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
							Pengangguran : Jumlah Angkatan Kerja) x 100%. TPT Kabupaten Wonogiri di tahun 2024 sebesar 2,16% dari sebelumnya 2,40%. Angka ini menjadi prestasi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk supaya dipertahankan	dan mendorong pencari kerja untuk segera mendapatkan pekerjaan.
2.1	SASARAN II: Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58,03	76,80	132,35	Analisis Keberhasilan: - Telah banyaknya pencari kerja yang mendaftarkan diri mereka sebagai pencari kerja melalui pelayanan AK/1. - Adanya antusias yang tinggi akan beberapa layanan yang diberikan seperti <i>Career Class</i>, Live IG, Konsultasi <i>Online</i> dan memberi dampak positif seperti pencari kerja mendapatkan informasi yang cukup seputar dunia kerja dan merasa siap untuk menghadapi dunia kerja. Dan kendala lainnya seperti saat pencari kerja telah mendapat pekerjaan dan memutuskan <i>resign</i>, mereka menjadi lebih tahan lama bekerja karena mendapat arahan dari petugas Pengantar Kerja untuk lebih dalam mempelajari lingkungan dan <i>job desc</i> pekerjaan sebelum memutuskan untuk <i>resign</i>.	Solusi yang dilakukan: - Mengajak para pencari kerja untuk lebih aktif dalam mengembangkan <i>skill</i> / potensi mereka agar memiliki nilai plus ketika menghadapi dunia kerja. - Memaksimalkan penempatan melalui Loker Pelayanan Dinas, BKK di SMK dan Job Fair Virtual - Melalui pelayanan seperti; pelayanan konseling jika ada pencari kerja yang masih bingung dengan lowongan kerja mana yang akan dilamar, penyuluhan aplikasi e-Makaryo dan Sisnaker untuk melamar kerja secara <i>online</i> dan bimbingan <i>Career Class</i> untuk pencari kerja dalam meningkatkan <i>skill</i> saat menghadapi proses rekrutmen

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	17,19	26,32	153,11	Analisis Keberhasilan: - Pencari kerja yang telah membekali diri mereka dengan <i>skill</i> / kemampuan yang dapat menjadi nilai plus untuk melamar pekerjaan. - Adanya antusias dari para pencari kerja untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan UPTD BLK. - Inovasi WRP (<i>Work Readiness Progame</i>) yang dijalankan membawa dampak positif, yakni semakin banyak pencari kerja yang lebih siap mental untuk menghadapi dunia kerja.	Solusi yang dilakukan: - Mengajak para pencari kerja untuk lebih aktif dalam mengembangkan <i>skill</i> / potensi mereka agar memiliki nilai plus ketika menghadapi dunia kerja. - Memaksimalkan fungsi publikasi melalui sosial media yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri agar dapat tersampaikan hingga ke daerah-daerah.
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	1,73	0,62	164,16	Analisis Keberhasilan: - Telah banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan-kebijakan dalam mengelola para pegawainya setelah mendapat pembinaan dari Mediator (Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja). - Hak-hak karyawan telah dapat dipenuhi oleh sebagian besar perusahaan untuk menekan angka sengketa pengusaha dengan pekerja.	Solusi yang dilakukan: - Menjaga komunikasi dan terus membina perusahaan-perusahaan dengan turun langsung ke lapangan atau secara online melalui <i>Zoom Meeting</i>. - Mendorong perusahaan-perusahaan untuk memiliki dan melengkapi alat-alat HI.

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
3.	TUJUAN III: Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	4,05	4,56	112,59	Analisis Keberhasilan: Adanya pertumbuhan usaha mikro baru di wilayah Kabupaten Wonogiri. Faktor lainnya antara lain kondisi ekonomi daerah, potensi sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dukungan pemerintah dan kondisi sosial budaya.	Solusi yang dilakukan: Meningkatkan pertumbuhan wirausaha melalui pelatihan-pelatihan UMKM.
3.1	SASARAN III: Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Peng usaha	350	352	100,57	Analisis Keberhasilan: Adanya pertumbuhan PPBT ini disebabkan karena dukungan pemerintah berupa pelatihan dan pembinaan, fasilitasi akses permodalan, inkubator bisnis dan konektivitas infrastruktur.	Solusi yang dilakukan: Memberi kemudahan bagi PPBT untuk mengembangkan usahanya, mulai dari perizinan hingga pengembangan bisnis.

Sumber: RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2021-2026 dan Monev Triwulanan PK 2025

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada kegiatan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bertujuan untuk memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki 3 Tujuan, 3 Sasaran dan 8 Program yang menghasilkan angka Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut:

TUJUAN 1

Tujuan 1 memiliki persentase rata-rata capaian dari 1 indikator sebesar 80,43% serta dengan 1 program yang memiliki persentase total per tujuan dari segi anggaran sebesar 82,29%. Maka, Tingkat Efisiensi dan Tiingkat Efektifitasnya sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi: $\% \text{Capaian per Tujuan} - \% \text{Serapan Anggaran per Tujuan} =$
 $80,43\% - 82,29\% = -1,86\%$

Tingkat Efektifitas: $\frac{\% \text{Capaian per Tujuan}}{\% \text{Serapan Anggaran per Tujuan}} \times 100\% = \frac{80,43\%}{82,29\%} \times 100\% = 97,74\%$

TUJUAN 2

Tujuan 2 memiliki persentase rata-rata capaian dari 2 indikator sebesar 117,86% serta dengan 4 program yang memiliki persentase total per tujuan dari segi anggaran sebesar 93,49%. Maka, Tingkat Efisiensi dan Tiingkat Efektifitasnya sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi: $\% \text{Capaian per Tujuan} - \% \text{Serapan Anggaran per Tujuan} =$
 $117,86\% - 93,49\% = 24,37\%$

Tingkat Efektifitas: $\frac{\% \text{Capaian per Tujuan}}{\% \text{Serapan Anggaran per Tujuan}} \times 100\% = \frac{117,86\%}{93,49\%} \times 100\% = 120,06\%$

TUJUAN 3

Tujuan 3 memiliki persentase rata-rata capaian dari 1 indikator sebesar 112,59% serta dengan 3 program yang memiliki persentase total per tujuan dari segi anggaran sebesar 98,43%. Maka, Tingkat Efisiensi dan Tiingkat Efektifitasnya sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi: $\% \text{Capaian per Tujuan} - \% \text{Serapan Anggaran per Tujuan} =$
 $112,59\% - 98,43\% = 14,16\%$

Tingkat Efektifitas: $\frac{\% \text{Capaian per Tujuan}}{\% \text{Serapan Anggaran per Tujuan}} \times 100\% = \frac{112,59\%}{98,43\%} \times 100\% = 114,38\%$

SASARAN 1

Sasaran 1 memiliki persentase rata-rata capaian dari 5 indikator sebesar 120,38% serta dengan 1 program yang memiliki persentase total per sasaran dari segi anggaran sebesar 82,29%. Maka, Tingkat Efisiensi dan Tiingkat Efektifitasnya sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi: $\% \text{Capaian per Sasaran} - \% \text{Serapan Anggaran per Sasaran} = 120,38\% - 82,29\% = 38,09\%$

Tingkat Efektifitas: $\frac{\% \text{Capaian per Sasaran}}{\% \text{Serapan Anggaran per Sasaran}} \times 100\% = \frac{120,38\%}{82,29\%} \times 100\% = 146,28\%$

SASARAN 2

Sasaran 2 memiliki persentase rata-rata capaian dari 3 indikator sebesar 149,87% serta dengan 4 program yang memiliki persentase total per sasaran dari segi anggaran sebesar 93,49%. Maka, Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektifitasnya sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi: $\% \text{Capaian per Sasaran} - \% \text{Serapan Anggaran per Tujuan} = 149,87\% - 93,49\% = 56,38\%$

Tingkat Efektifitas: $\frac{\% \text{Capaian per Tujuan}}{\% \text{Serapan Anggaran per Tujuan}} \times 100\% = \frac{149,87\%}{93,49\%} \times 100\% = 160,30\%$

SASARAN 3

Sasaran 3 memiliki persentase rata-rata capaian dari 1 indikator sebesar 100,57% serta dengan 3 program yang memiliki persentase total per sasaran dari segi anggaran sebesar 98,43%. Maka, Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektifitasnya sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi: $\% \text{Capaian per Sasaran} - \% \text{Serapan Anggaran per Tujuan} = 100,57\% - 98,43\% = 2,14\%$

Tingkat Efektifitas: $\frac{\% \text{Capaian per Tujuan}}{\% \text{Serapan Anggaran per Tujuan}} \times 100\% = \frac{100,57\%}{98,43\%} \times 100\% = 102,17\%$

Dan persentase serapan anggaran keseluruhan, dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% = \frac{6.959.546.951}{8.303.127.791} \times 100\% = 83,82\%$$

Analisis:

Kinerja secara keseluruhan telah mencapai efisiensi dan efektifitas dan dari sisi anggaran terserap sebesar 83,82% dikarenakan:

1. Anggaran gaji digunakan mengalami perubahan karena pegawai yang pensiun, mutasi dan pengurangan tunjangan suami/istri/anak.
2. Dari sisi pendapatan berkurang, karena pendapatan yang didapat dari TKA (Tenaga Kerja Asing), tidak memperpanjang kontrak di Indonesia.

Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TUJUAN

No	Tujuan	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1	Nilai Kematangan Organisasi	Indeks	46	37	80,43	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.193.913.309	5.920.134.225	82,29
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					80,43	TOTAL PER TUJUAN		7.193.913.309	5.920.134.225	82,29
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> -1,86%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 97,74%												
2	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	2.1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,70	97,84	101,18	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	4.159.800	4.142.500	99,58
								3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	780.967.564	716.594.776	91,76
		2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,30	2,16	134,54	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	133.445.110	131.576.150	98,60
								5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	141.368.508	138.601.700	98,04
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					117,86	TOTAL PER TUJUAN		1.059.940.982	990.915.126	93,49
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 24,37%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 120,06%												
3	Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	3.1	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	4,05	4,56	112,59	6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	23.775.000	23.464.800	98,70
								7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.129.900	9.832.000	97,06
								8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.368.600	15.200.800	98,91
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					112,59	TOTAL PER TUJUAN		49.273.500	48.497.600	98,43
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 14,16%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 114,38%												
								TOTAL KESELURUHAN		8.303.127.791	6.959.546.951	83,82

SASARAN

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	1.1	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Indeks	77,50	78,30	101,03	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.193.913.309	5.920.134.225	82,29
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	81	80,67	99,59					
		1.3	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	Orang	4	4	100					
		1.4	Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	1	2	200					
		1.5	IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Angka	91	92,15	101,26					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR					120,38		TOTAL PER SASARAN		7.193.913.309	5.920.134.225
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 38,09%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 146,28%												
2	Menurunnya pengangguran	2.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58,03	76,80	132,35	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	4.159.800	4.142.500	99,58
								3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	780.967.564	716.594.776	91,76
		2.2	Besaran kompetensi calon tenaga kerja	%	17,19	26,32	153,11	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	133.445.110	131.576.150	98,60
		2.3	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun	%	1,73	0,62	164,16	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	141.368.508	138.601.700	98,04
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR					149,87		TOTAL PER SASARAN		1.059.940.982	990.915.126
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 56,38%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 160,30%												
3	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	3.1	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Peng usaha	350	352	100,57	6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	23.775.000	23.464.800	98,70
								7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.129.900	9.832.000	97,06
								8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.368.600	15.200.800	98,91
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100,57		TOTAL PER SASARAN		49.273.500	48.497.600
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 2,14%												

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%	
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 102,17%												
							TOTAL KESELURUHAN			8.303.127.791	6.959.546.951	83,82

Keterangan :

	: capaian kinerja kurang dari 100%
	: capaian kinerja 100%
	: capaian kinerja lebih dari 100%

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan melihat realisasi kinerja yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan. Selama tahun 2025, program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan telah menunjang keberhasilan kinerja. Hal itu dibuktikan dengan pencapaian target pada setiap program dan kegiatan yang telah mencapai $\geq 100\%$.

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan di Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	TUJUAN I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	Index	80,43				
1.1	SASARAN I: Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Index	101,03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	Menunjang
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	99,59	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	Menunjang
		Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan	Orang	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	Menunjang
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	Menunjang
		IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Angka	101,26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	Menunjang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	Menunjang
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	Menunjang
2	TUJUAN II: Meningkatkan partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	101,18				
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	134,54				
2.1	SASARAN II: Menurunnya Pengangguran	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	132,35	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	Menunjang
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun	100%	Menunjang
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	132,23%	Menunjang
					Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	101,23%	Menunjang
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun Link and Match nya	103,94%	Menunjang
					Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	112%	Menunjang
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%	153,11	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	693,55%	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	104,79%	Menunjang
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah program pelatihan yang sudah link and match dengan perusahaan	110%	Menunjang
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%	Menunjang
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%	164,16	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	132,23%	Menunjang
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang mempunyai sarana HI	100%	Menunjang
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan	100%	Menunjang
3.	TUJUAN III: Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%	4,56				

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
3.1	SASARAN III: Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha makro dan mikro	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Peng usaha	352	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	100%	Menunjang
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang diberdayakan	301,60%	Menunjang
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		100,20%	Menunjang
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI yang diterbitkan	126,67%	Menunjang
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	125%	Menunjang
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Informasi Industri	135,71%	Menunjang

Sumber: RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2021-2026 dan Monev PK 2025

8. Capaian Output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Dengan melihat realisasi kinerja yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan. Selama tahun 2025 capaian output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah mencapai target. Namun, terdapat 1 Sub Kegiatan dengan capaian kurang dari 100% terletak pada Sub Kegiatan “Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor”, dimana pada tahun 2025 terdapat target 19 laporan gaji untuk tenaga kontrak beberapa pegawai yang pensiun dan mutasi, sehingga belum mencapai target.

Jumlah Sub Kegiatan yang telah mencapai capaian 100%, <100% dan >100% dijelaskan sebagai berikut:

Sub Kegiatan dengan capaian 100%	=	23 Sub Kegiatan
Sub Kegiatan dengan capaian <100%	=	1 Sub Kegiatan
Sub Kegiatan dengan capaian >100%	=	16 Sub Kegiatan
Total Sub Kegiatan	=	40 Sub Kegiatan

Berikut tabel capaian output program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025:

Tabel 3.20
Capaian Output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	%	100	100	100%
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	100	100	100%
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	100%
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	%	100	100	100%
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	37	44	118,92%
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian	%	100	100	100%
1.3.1			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	6	11	183,33%
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	%	100	100	100%
1.4.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	100%
1.4.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	6	150%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.4.3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	20	20	100%
1.4.4			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	paket	3	11	366,67%
1.4.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun	laporan	24	60	250%
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100%
1.5.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	7	7	100%
1.5.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	36	100%
1.5.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	19	14	73,68%
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100%
1.6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	31	46	148,39%
1.6.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	20	100%
1.6.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	2	200%
1.6.4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	unit	10	12	120%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
1.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	%	100	100	100%
1.7.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	6	600%
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	7,1	7,1	100%
2.1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun	dokumen	2	2	100%
2.1.2			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	perusahaan	5	6	120%
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	1,24	8,60	452,89%
3.1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	peserta	2.400	2.515	104,79%
3.1.1			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	2.000	2.515	125,75%
3.1.2			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga	10	10	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.1.3			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	unit	5	5	100%
3.2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Program Pelatihan yang sudah <i>link and match</i> dengan perusahaan	program	10	11	110%
3.2.1			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	28	28	100%
3.3		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	%	100	100	100%
3.3.1			Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	perizinan	7	7	100%
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	58,03	76,80	132,35%
4.1		Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota		Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	orang	7.250	7.339	101,23%
4.1.1			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	5.000	7.227	144,54%
4.1.2			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	1.200	1.200	100%
4.1.3			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	10	20	200%
4.2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun <i>Link and Match</i> nya	lowongan kerja	9.000	9.355	103,94%
4.2.1			Pemeliharaan & Operasional Apk. Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	12	12	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.2.2			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	600	790	131,67%
4.2.3			Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	750	756	100,80%
4.3		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota		Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	orang	100	112	112%
4.3.1			Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	30	30	100%
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	13	17,19	132,23%
5.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan Yang mempunyai sarana HI	perusahaan	10	10	100%
5.1.1			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	10	10	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.1.2			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	dokumen	1	1	100%
5.2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti Pembinaan Ketenagakerjaan	perusahaan	10	10	100%
5.2.1			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	50	50	100%
5.2.2			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	3	3	100%
5.2.3			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	1	1	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.2.4			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	600	1.195	199,17%
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	17,80	17,80	100%
6.1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang diberdayakan	%	1,50	1,90	126,67%
6.1.1			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	1	100%
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	%	5	5,01	100,20%
7.1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IUI yang diterbitkan	IUI	10	10	100%
7.1.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha	dokumen	1	1	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
			perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				
7.1.2			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen	1	1	100%
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	0,56	0,70	125%
8.1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI & IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Wilayah Informasi Industri	Kecamatan	14	19	135,71%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
8.1.1			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1	1	100%
8.1.2			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	dokumen	1	1	100%

Sumber: Monev PK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.193.913.309	5.920.134.225	82,29
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.750	9.960.900	99,61
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.750	9.960.900	99,61
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.467.904.238	5.308.734.488	82,08
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.467.904.238	5.308.734.488	82,08
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.571.006	68.355.786	99,69
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.934.100	98,35
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.799.460	10.731.400	99,37
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.999.700	3.992.250	99,81
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.991.800	99,92
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.771.846	39.706.236	99,84
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.981.015	437.192.351	79,64
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000	134.680.251	88,72
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.181.015	301.512.100	76,10

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	63.457.300	62.690.700	98,79
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.999.200	39.268.500	98,17
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.960.000	17.959.500	100
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.498.100	2.462.700	98,58
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	33.200.000	94,86
1.7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	33.200.000	94,86
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	4.159.800	4.142.500	99,58
2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	4.159.800	4.142.500	99,58
2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	4.159.800	4.142.500	99,58
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	780.967.564	716.594.776	91,76
3.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	774.967.570	710.649.016	91,70
3.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	634.838.620	572.274.940	90,14
3.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	15.129.000	15.129.000	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	124.999.950	123.245.076	98,60
3.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.999.994	2.999.130	99,97
3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.999.994	2.999.130	99,97
3.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	3.000.000	2.946.630	98,22
3.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	3.000.000	2.946.630	98,22
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	133.445.110	131.576.150	98,60
4.1	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	89.303.640	88.604.650	99,22
4.1.1	Pelayanan Antar Kerja	25.226.940	24.969.000	98,98
4.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	33.711.200	33.652.750	99,83
4.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	30.365.500	29.982.900	98,74
4.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	39.141.600	38.144.000	97,45
4.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.999.650	9.899.000	98,99
4.2.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2.365.000	2.328.000	98,44
4.2.3	Job Fair / Bursa Kerja	26.776.950	25.917.000	96,79
4.3	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	4.999.870	4.827.500	96,55
4.3.1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4.999.870	4.827.500	96,55
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	141.368.508	138.601.700	98,04
5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	6.019.990	5.802.900	96,39

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Daerah Kabupaten/Kota			
5.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	3.000.000	2.998.000	99,93
5.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	3.019.990	2.804.900	92,88
5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	135.348.518	132.798.800	98,12
5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.197.420	4.002.500	95,36
5.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	2.974.000	99,13
5.2.3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	10.497.880	10.442.500	99,47
5.2.4	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	117.653.218	115.379.800	98,07
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	23.775.000	23.464.800	98,70
6.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	23.775.000	23.464.800	98,70
6.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.775.000	23.464.800	98,70
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.129.900	9.832.000	97,06
7.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha	10.129.000	9.832.000	97,06

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5.363.600	5.305.000	98,91
7.1.2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	4.766.300	4.527.000	94,98
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.368.600	15.200.800	98,91
8.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.368.600	15.200.800	98,91
8.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6.000.000	5.964.000	99,40
8.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	9.368.600	9.236.800	98,59
	TOTAL	8.303.127.791	6.959.546.951	83,82

Sumber: Laporan Pagu dan Realisasi Anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada aplikasi e-SAKIP

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja mulai dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran.

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan adalah 83,82%, dimana di dalamnya terdiri dari Belanja Operasional yang meliputi; Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang meliputi; Belanja Modal Peralatan Mesin. Namun, untuk perhitungan capaian kinerja keuangan selain Belanja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sudah di atas 90%.

Adapun untuk capaian keuangan tersebut disajikan pada data berikut ini:

Tabel 3.22
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025
01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	121.000.000,00	181.844.472,00	150,28	59.160.200,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.000.000,00	181.844.472,00	150,28	59.160.200,00
4.1.02	Retribusi Daerah	119.000.000,00	178.394.472,00	149,91	56.660.400,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	3.450.000,00	172,50	2.499.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.000.000,00	181.844.472,00	150,28	59.160.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN	121.000.000,00	181.844.472,00	150,28	59.160.200,00
5	BELANJA DAERAH	8.303.127.791,00	6.959.546.951,00	83,82	8.992.988.492,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.195.377.791,00	6.853.596.951,00	83,63	8.918.251.492,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.467.904.238,00	5.308.734.488,00	82,08	5.221.912.283,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.727.473.553,00	1.544.862.463,00	89,43	3.696.339.209,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.195.377.791,00	6.853.596.951,00	83,63	8.918.251.492,00
5.2	BELANJA MODAL	107.750.000,00	105.950.000,00	98,33	74.737.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.750.000,00	105.950.000,00	98,33	74.737.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	107.750.000,00	105.950.000,00	98,33	74.737.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.303.127.791,00	6.959.546.951,00	83,82	8.992.988.492,00
	SURPLUS/DEFISIT	(8.182.127.791,00)	(6.777.702.479,00)	82,84	(8.933.828.292,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025

Realisasi Anggaran dan Persentase Capaian Anggaran per Triwulan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Realisasi dan Persentase Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Per Triwulan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN I	MENINGKATNYA KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.750	737.500	7,38	1.097.500	10,98	2.726.900	27,27	9.960.900	99,61
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.750	737.500	7,38	1.097.500	10,98	2.726.900	27,27	9.960.900	99,61
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.467.904.238	1.329.278.414	20,55	2.836.567.548	43,86	3.954.789.591	61,14	5.308.734.488	82,08
		1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.467.904.238	1.329.278.414	20,55	2.836.567.548	43,86	3.954.789.591	61,14	5.308.734.488	82,08
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.571.006	9.602.600	14	28.965.236	42,24	42.374.586	61,8	68.355.786	99,69
		1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	1.932.000	48,30	3.160.400	79,01	3.160.400	79,01	3.934.100	98,35
		1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.799.460	3.826.600	35,43	7.096.800	65,71	7.096.800	65,71	10.731.400	99,37
		1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.999.700	150.000	3,75	592.500	14,81	2.322.250	78,69	3.992.250	99,81
		1.4.4 Penyediaan Barang Cetak	10.000.000	1.994.000	19,94	7.186.300	71,86	7.868.900	55,13	9.991.800	99,92

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan Penggandaan									
		1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.771.846	1.700.000	4,27	10.929.236	27,48	21.926.238	55,13	39.706.236	99,84
	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		548.981.015	79.279.141	14,44	209.989.226	38,25	319.020.967	58,11	437.192.351	79,64
		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100
		1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000	21.072.741	13,88	66.772.426	43,99	99.850.067	65,78	134.680.251	88,72
		1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.181.015	57.206.400	14,44	142.216.800	35,90	218.170.900	55,07	301.512.100	76,10
	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		63.457.300	4.377.000	6,90	26.901.000	42,39	51.185.700	80,66	62.690.700	98,79
		1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.999.200	3.411.000	8,53	18.765.000	46,91	29.266.500	73,17	39.268.500	98,17
		1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	140.000	4,67	2.310.000	77	2.310.000	77	3.000.000	100
		1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.960.000	0	0	5.000.000	27,84	17.959.500	100	17.959.500	100
		1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.498.100	826.000	33,07	826.000	33,07	1.649.700	66,04	2.462.700	98,58
	1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		35.000.000	0	0	33.200.000	94,86	33.200.000	94,86	33.200.000	94,86
		1.7.1	Pengadaan Peralatan dan	35.000.000	0	0	33.200.000	94,86	33.200.000	94,86	33.200.000	94,86

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mesin Lainnya									
TOTAL PER SASARAN				7.193.913.309	1.423.274.655	19,78	3.136.720.510	43,60	4.403.297.744	61,21	5.920.134.225	82,29
SASARAN II	MENURUNNYA PENGANGGURAN											
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA											
	2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		4.159.800	0	0	0	0	987.500	23,74	4.142.500	99,58
		2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	4.159.800	0	0	0	0	987.500	23,74	4.142.500	99,58
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
	3.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		774.967.570	0	0	101.195.490	13,06	379.722.840	49	710.649.016	91,7
		3.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	634.838.620	0	0	101.195.490	15,94	374.547.840	59	572.274.940	90,14
		3.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	15.129.000	0	0	0	0	5.175.000	34,21	15.129.000	100
		3.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	124.999.950	0	0	0	0	0	0	123.245.076	98,6
	3.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		2.999.994	0	0	2.999.130	99,97	2.999.130	99,97	2.999.130	99,97
		3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.999.994	0	0	2.999.130	99,97	2.999.130	99,97	2.999.130	99,97
	3.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		3.000.000	1.015.000	33,83	2.946.630	98,22	2.946.630	98,22	2.946.630	98,22
		3.3.1	Penyediaan Sumber Daya	3.000.000	1.015.000	33,83	2.946.630	98,22	2.946.630	98,22	2.946.630	98,22

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi									
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
	4.1	Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota		89.303.640	32.630.250	36,54	59.152.250	66,24	85.103.650	95,3	88.604.650	99,22
		4.1.1	Pelayanan Antar Kerja	25.226.940	15.000.000	59,46	24.251.000	96,13	24.251.000	96,13	24.969.000	98,98
		4.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	33.711.200	17.630.250	52,3	32.901.250	97,6	33.261.250	98,67	33.652.750	99,83
		4.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	30.365.500	0	0	2.000.000	6,59	27.591.400	90,86	29.982.900	98,74
	4.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		39.141.600	9.899.000	25,29	33.358.000	85,22	33.358.000	85,22	38.144.000	97,45
		4.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.999.650	9.899.000	98,99	9.899.000	98,99	9.899.000	98,99	9.899.000	98,99
		4.2.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2.365.000	0	0	2.328.000	98,44	2.328.000	98,44	2.328.000	98,44
		4.2.3	Job Fair / Bursa Kerja	26.776.950	0	0	21.131.000	78,91	21.131.000	78,91	25.917.000	96,79
	4.3	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota		4.999.870	0	0	0	0	4.827.500	96,55	4.827.500	96,55
		4.3.1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4.999.870	0	0	0	0	4.827.500	96,55	4.827.500	96,55
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
	5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6.019.990	60.000	1	60.000	1	1.099.900	18,27	5.802.900	96,39

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	3.000.000	60.000	2	60.000	2	1.018.000	33,93	2.998.000	99,93
		5.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	3.019.990	0	0	0	0	81.900	2,71	2.804.900	92,88
	5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		135.348.518	105.000	0,08	2.719.500	2,01	6.520.000	4,82	132.798.800	98,12
		5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.197.420	0	0	0	0	1.452.500	34,6	4.002.500	95,36
		5.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	0	0	0	0	288.000	9,6	2.974.000	99,13
		5.2.3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	10.497.880	0	0	1.665.500	15,87	3.725.500	35,49	10.442.500	99,47
		5.2.4	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	117.653.218	105.000	0,09	1.054.000	0,9	1.054.000	0,9	115.379.800	98,07

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pekerja									
TOTAL PER SASARAN				1.059.940.982	43.709.250	4,12	202.431.000	19,10	517.565.150	48,83	990.915.126	93,49
SASARAN III	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PELAKU USAHA MAKRO DAN MIKRO											
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
	6.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		23.775.000	0	0	1.187.000	4,99	3.009.500	12,66	23.464.800	98,7
		6.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.775.000	0	0	1.187.000	4,99	3.009.500	12,66	23.464.800	98,7
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											
	7.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		10.129.900	0	0	580.000	5,73	6.191.000	61,12	9.832.000	97,06
		7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5.363.600	0	0	450.000	8,39	2.602.000	48,51	5.305.000	98,91
		7.1.2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single	4.766.300	0	0	130.000	2,73	3.589.000	75,3	4.527.000	94,98

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Submission Risk Base Approach (OSS RBA)									
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											
	8.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		15.368.600	0	0	8.835.700	57,49	11.599.000	75,47	15.200.800	98,91
		8.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6.000.000	0	0	1.672.000	27,87	2.855.000	47,58	5.964.000	99,4
		8.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	9.368.600	0	0	7.163.700	76,47	8.744.000	93,33	9.236.800	98,59
TOTAL PER SASARAN				49.273.500	0	0	10.602.700	21,52	20.799.500	42,21	48.497.600	98,43
GRAND TOTAL PER SASARAN				8.303.127.791	1.466.983.905	17,67	3.349.754.210	40,34	4.941.662.394	59,52	6.959.546.951	83,82

Sumber: Laporan Program dan Kegiatan APBD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja sesuai dalam Perubahan RENSTRA 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 120,38%
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 149,87%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,57%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Selama Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.303.127.791,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 6.959.546.951,00. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp 1.343.580.840,00.

4.2. Rekomendasi

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan untuk pencapaian target di suatu organisasi, diperlukan strategi, di antaranya untuk:

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	REKOMENDASI
Tujuan I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		
	Nilai Kematangan Organisasi	- Menyosialisasikan ke semua pegawai terkait penilaian Kematangan Organisasi. - Dukungan aktif pegawai dalam menyusun dokumen-dokumen data dukung penilaian Kematangan Organisasi - Pengarsipan dokumen yang terstruktur akan membantu saat proses penilaian Kematangan Organisasi
Sasaran I: Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri		
	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Dengan mempertahankan dan meningkatkan perolehan nilai SAKIP dengan memenuhi rekomendasi pasca evaluasi seperti yang tertuang dalam LHE (Lembar Hasi Evaluasi).
	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	- Menyosialisasikan mengenai Indeks Profesionalitas ASN kepada pegawai. - Dukungan anggaran yang memadai agar dapat mengikutsertakan pegawai dalam program-program pelatihan. - Peran serta pegawai yang aktif untuk mengikuti pelatihan.
	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan	Dengan menambah jumlah Agen Perubahan agar semakin membawa dampak positif terutama bagi pegawai ASN yang memiliki kepribadian dan reputasi yang baik.
	Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	Mengembangkan dengan lebih mendalam agar adanya inovasi ini dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	REKOMENDASI
	IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	- Meningkatkan target di tahun 2025 dengan <i>baseline</i> target dari angka capaian 2024. - Meningkatkan pelayanan.
Tujuan II: Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja		
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang baik serta mendorong masyarakat/pencari kerja untuk segera mendapatkan pekerjaan.
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	- Mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dengan memberi pelayanan ketenagakerjaan yang baik dan mendorong masyarakat/pencari kerja untuk segera mendapatkan pekerjaan. - Meningkatkan target di tahun 2026 dengan <i>baseline</i> target dari angka capaian 2025.
Sasaran II: Menurunnya Pengangguran		
	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	- Mendorong pencari kerja untuk mengembangkan <i>skill</i> yang dimiliki. - Memaksimalkan layanan konseling, penyuluhan aplikasi ketenagakerjaan dan peningkatan <i>softskill</i>. - Meningkatkan target di tahun 2026 dengan <i>baseline</i> target dari angka capaian 2025.
	Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	- Mendorong pencari kerja untuk mengembangkan <i>skill</i> yang dimiliki. - Memaksimalkan fungsi publikasi melalui sosial media. - Mengembangkan kegiatan yang bersifat peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja. - Meningkatkan target di tahun 2026 dengan <i>baseline</i> target dari angka capaian 2025.

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	REKOMENDASI
	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	- Menjaga komunikasi dalam membina perusahaan, baik melalui visitasi maupun <i>zoom meeting</i>. - Mendorong perusahaan untuk memenuhi kelengkapan alat-alat Hubungan Industrial. - Meningkatkan target di tahun 2026 dengan <i>baseline</i> target dari angka capaian 2025.
Tujuan III: Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro		
	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha melalui pelatihan-pelatihan UMKM.
Sasaran III: Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro		
	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Memberi kemudahan bagi PPBT (Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi) untuk mengembangkan usahanya, mulai dari perizinan hingga pengembangan bisnis.

Dari rekomendasi yang telah dijelaskan pada tabel di atas, terdapat beberapa Indikator yang direviu oleh Bagian Organisasi, untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI,



WIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700904 199803 1 009

LAMPIRAN